



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok  
AROSUKA

---

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)**



**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata cara Riviun atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan implementasi Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua aparatur dan pihak-pihak terkait baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat.

Arosuka, Pebruari 2022

Kepala

**ELLAFKI.S.Pd.MM**

NIP.196911122000121002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan setiap kegiatan kepada masyarakat. Pertanggung jawaban disusun dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas tersebut ditunjukkan dengan pengukuran kinerja, mencakup ketercapaian Visi, Misi, tujuan dan agenda pembangunan. Akuntabilitas juga menghendaki pengungkapan data dan fakta ketercapaian target – target secara objektif dan jujur.

Pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Solok berarti pengukuran ketercapaian Visi , Misi dan Tujuan agenda pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, Rencana Strategis 2021-2026 dan rencana kerja 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok. Dengan demikian yang akan diukur tersebut adalah tercapainya Visi Kabupaten Solok “ **MAMBANGKIT BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT** “ yang dicapai melalui Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengindikasikan sasaran strategis tersebut.

Setelah dilakukan pengukuran terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja utama tersebut, sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 dan diperoleh hasil dengan kategori baik pada ke lima Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Bupati Solok Tahun 2021.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka menciptakan Good Governance diperlukan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun pengertian Good Governance adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut 'good governance' (pemerintahan yang baik). Untuk itu agar "good governance" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, private sector dan masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut adanya "alignment" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan instruksi Presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah dan SKPD sebagai instansi Pemerintah diminta untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan perannya dalam pengeloaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistim akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LKjIP Tahun 2021 berdasarkan pada Indikator (Inputs, output dan autcomes), juga diatur mengenai metode, mekenisme dan tatacara pelaporannya. Oleh karena itu laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh instansi Pemerintah kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2021.

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 37 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok yaitu:

### **1. Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan

bidang ketentraman, perlindungan masyarakat dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

## 2. Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- A. Perumusan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran
- B. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- C. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- D. Pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

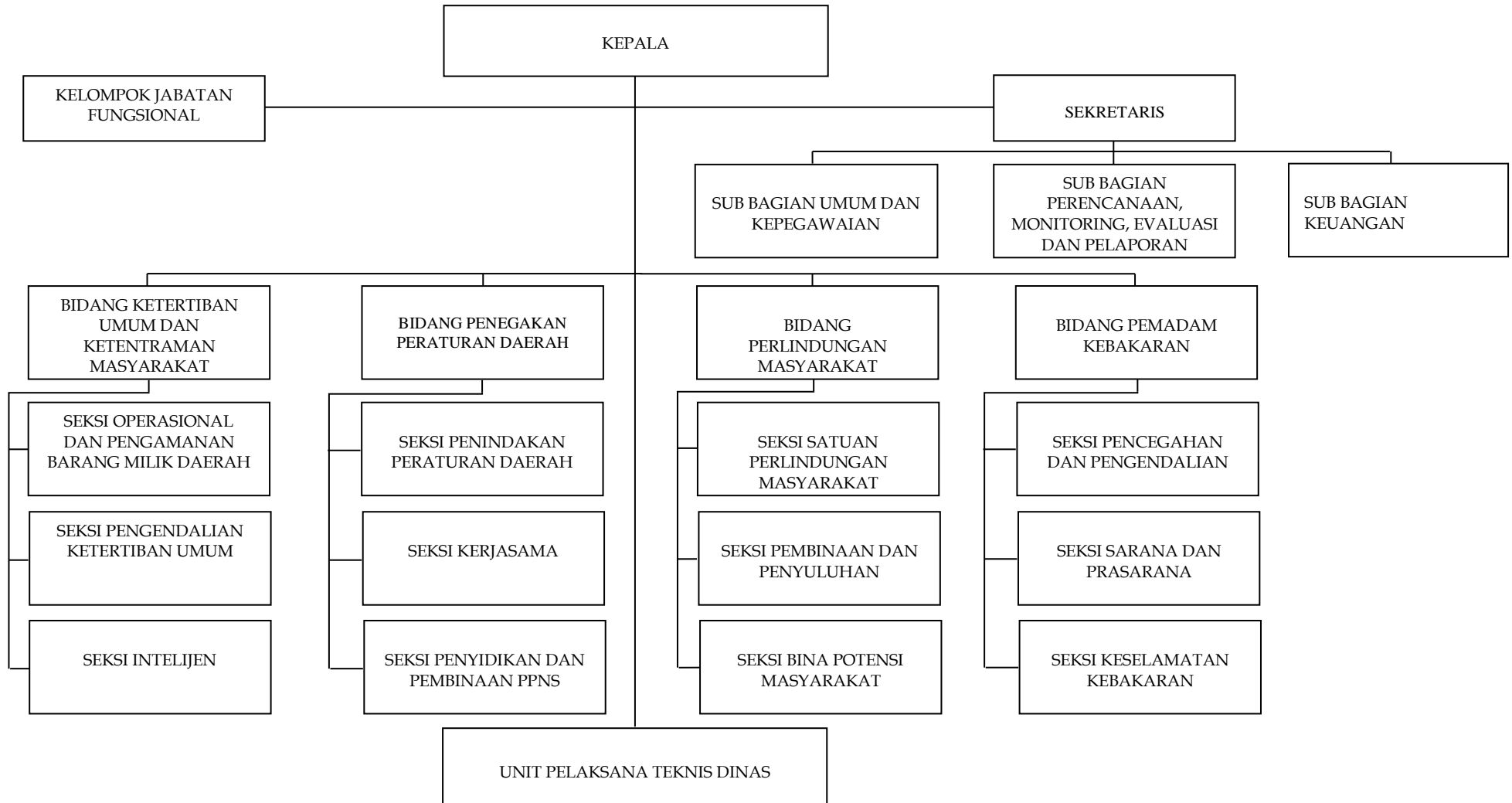
## C. Struktur Organisasi

Stuktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut :

- Plt.Kepala Satuan : ALKAMRA ADLIS, SH.MM
- Sekretaris : ALKAMRA ADLIS, SH.MM
  - Plh.Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian : Sultriadi,AMd
  - Sub.Bagian Peencanaan Monev dan Pelaporan : SRI MARYANTI
  - Sub.Bagian Keuangan : NASDIARTISNI
- Bidang Tibumtranmas : JHONI.S.Sos.MM
  - Plh.Seksi Operasional dan Pengamanan Barang Milik Daerah : RONI NOVRIADI,SH
  - Seksi Pengendalian Ketertiban Umum : SYUKRIL,S.Sos
  - Plh.Seksi Intelijen : FERI HENDRA.S.Sos
- Bidang Penegak Peraturan Daerah : RUBY EKA PUTRAN,SE.MM

- Seksi Penindakan Peraturan Daerah : -
- Seksi Kerjasama : -
- Seksi Penyidikan dan Pembinaan PPNS : TOPAN HARDIA M, SH
- Bidang Perlindungan Masyarakat : SALMAH,S.Pd.MM
  - Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat : ANTONIUS, SE
  - Seksi Pembinaan dan Penyuluhan : ZONDRI OKI, SH
  - Seksi Bina Potensi Masyarakat : HERMAN
- Bidang Pemadam Kebakaran : MARLAINI, SPd.MM
  - Seksi Pencegahan dan Pengendalian : -
  - Seksi Sarana dan Prasarana : ROBBY RAHMAT, SST
  - Seksi KeselamatanKebakaran : ISMUL PUTRA,S.Sos

Gambar 1.1 Struktur organisasi



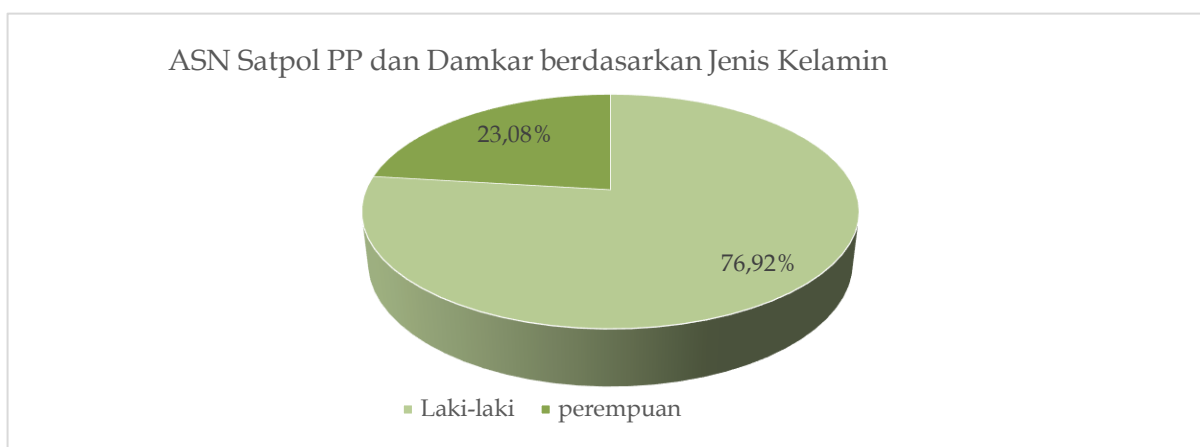


Jumlah Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 245 orang dengan rincian pada tabel 2.1

Tabel 2.1  
Komposisi Pegawai menurut jenis kelamin

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan
1.	Kepala Satpol PP dan Damkar	1	0
2.	Sekretariat	3	6
3.	Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	11	1
4.	Bidang Penegakan Perda	7	1
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat	6	0
6.	Bidang Pemadam kebakaran	12	4
	Total	40	12

Aparatur Satpol PP dan Damkar jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan, dimana aparatur Laki-laki berjumlah 40 orang atau 76,92 % dan Perempuan berjumlah 12 orang atau 23,08 % dari total aparatur yang ada. Kondisi ini bisa diakibatkan karena kondisi kerja pada Satpol PP dan Damkar sebagai Penyelenggara Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah serta Pemadam kebakaran, sehingga lebih banyak membutuhkan aparatur laki-laki. Komposisi aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan kelamin dilihat pada Grafik 2.2



Latar belakang golongan aparaturnya dapat dilihat pada tabel berikut 2.3

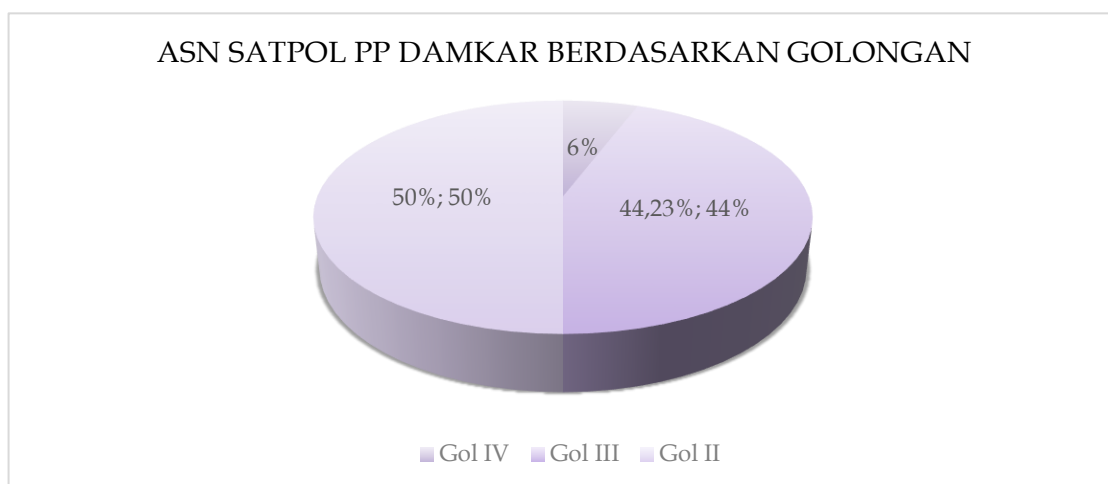
Tabel 2.3

Tabel 2.3  
Jumlah ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan Tahun 2021

No.	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol.II	Jumlah
1.	Kepala Satpol PP dan Damkar	1			1
2.	Sekretariat		5	4	9
3.	Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat	1	3	8	12
4.	Bidang Penegakan Perda	1	7		8
5.	Bidang Perlindungan Masyarakat		4	2	6
6.	Bidang Pemadam kebakaran		4	12	16
	<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>52</b>

Sumber : DUK Satpul dan Damkar 2021

Berdasarkan Golongan aparaturnya Satpol PP dan Damkar didominasi oleh Golongan II sebanyak 26 orang atau 50%, sedangkan Gol IV sebanyak 3 orang atau 5,77% dan aparaturnya Gol III sebanyak 23 orang atau 44,23%. Adapun komposisi aparaturnya Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Grafik 2.3



Grafik. 2.3

ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Golongan

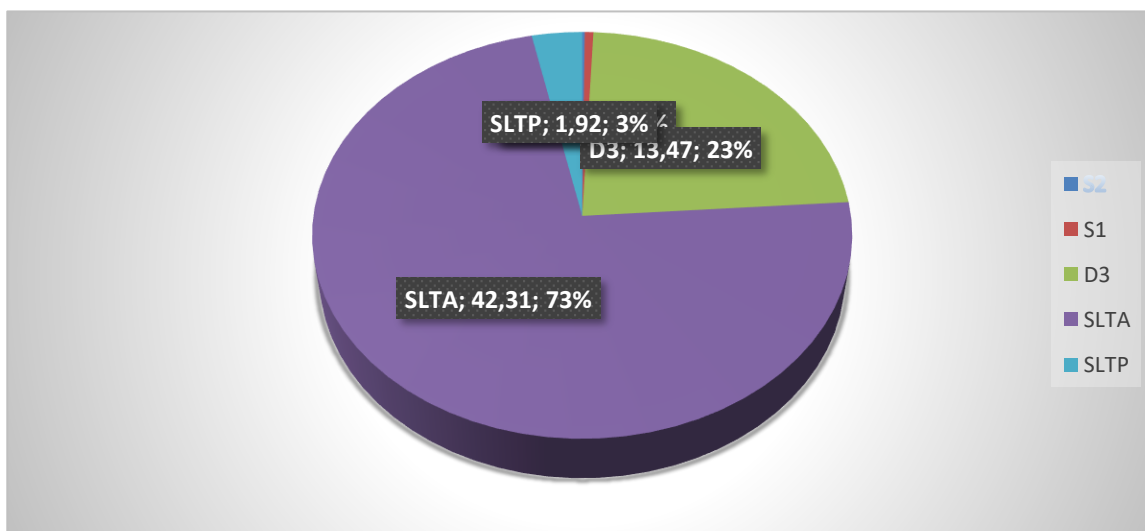
Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparaturnya adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya

pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki ASN. Adapun jumlah aparatur Satpol PP dan Damkar berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4 dan Gambar 2.4

Tabel 2.4.  
ASN Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase ( % )
S2	5	9,6
S1	17	32,70
D3	7	13,47
SLTA	22	42,31
SLTP	1	1,92

Aparatur Satpol PP dan Damkar berasal dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda, aparatur yang terbanyak dari tingkat Pendidikan SLTA berjumlah 22 orang atau sebesar 42,31% hal ini disebabkan karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Pemadam kebakaran sebagai Penyelenggara Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan Pemadam kebakaran, lebih banyak membutuhkan tenaga Pengamanan dan Pemadam kebakaran. Adapun komposisi aparatur Datpol PP Dan Damkar dapat dilihat pada grafik 2.4



Grafik 2.4  
Satpol PP dan Damkar berdasarkan Pendidikan

#### **D. Peran Strategis dan isu strategis**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran kabupaten Solok merupakan garda terdepan dalam pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat serta penegakan Perda, Perkada, penegakan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya aparat yang mengawal, Perda dan Perkada tersebut dilaksanakan serta dipatuhi oleh masyarakat, badan hukum maupun aparat itu sendiri, dan melaksanakan Pemadam Kebakaran.

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus di selenggarakan dan menjadi tugas dari kepala daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran

Dari permasalahan permasalahan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran maka dapat ditentukan **isu-isu strategis** yang dihadapi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok, sebagai berikut:

1. Rendahnya rasio personil Satpol PP yang berkualitas PPNS dibandingkan jumlah penduduk.
2. Rendahnya cakupan Patroli Petugas Satpol PP sehingga meningkatnya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
3. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada.
4. Kurangnya Sosialisasi tentang layanan Informasi Kebakaran.
5. Terbatasnya ketersediaan unit pemadam kebakaran.

#### **E. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKJIP**

Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok

Tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Solok sebagai bahan dukungan untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021.

Tujuan Penyusunan Laporan Akntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas Instansi kepada pihak-pihak yang membuat mandat, dan tercapainya sistim pencapaian akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, serta meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan misi tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat tercapainya Pemerintahan yang Baik (Good Governance) menuju masyarakat sejahtera, adapun maksud dan tujuan dari laporan Tahunan ini adalah:

- a. Mendapatkan gambaran pelaksanaan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.
- b. Agar terakumulasinya data dan masalah yang dihadapi.
- c. Menambah wawasan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.
- d. Dapat menjadi pedoman bagi perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dimasa yang akan datang.

#### **F. Sasaran**

Untuk mencapai maksud dan tujuan secara baik perlu adanya sasaran yang jelas sehingga mampu menjadi kegiatan yang lebih efektif sebagai berikut :

- a. Semua personil yang ada pada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat secara baik menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan.
- b. Fasilitas yang telah diberikan oleh kantor dapat dimaksimalkan mungkin secara efektif dan efisien.

#### **G. Sistim Penyajian**

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok ini pada dasarnya adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Solok selama Tahun 2021, Penyusunan LKjIP di mulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan/Sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dan Sub

kegiatan dengan rencananya, yaitu pencapaian kinerja (Performance Plan) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun menghasilkan ketidak sesuaian / kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (Performance gap) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan /kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN :

Latar belakang, fungsi dan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi sumberdaya aparatur dan tujuan penyusunan LKjIP, sasaran, sarana dan prasarana, peran strategis dan isu-isu strategis serta sistematika penyajian.

#### BAB II PERENCANAAN KINERJA :

Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Indikator Kinerja utama dan penetapan kinerja.

#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA :

##### A. CAPAIAN KINERJA

Menyajikan pengukuran capaian kinerja Tahun 2021, pencapaian strategis Tahun 2021 dan akuntabilitas keuangan.

##### B. REALISASI ANGGARAN

#### BAB IV PENUTUP :

Menyajikan kesimpulan keberhasilan atau kegagalan serta strategi pemecahan masalah untuk perbaikan pada masa yang akan datang.

#### LAMPIRAN - LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA)**

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar lebih dapat menyelaraskan Visi Dan Misi nya dengan Potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana straregis merupakan proses sistimatis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang berisiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak banyaknya pengetahuan yang antisipatif, dan mengkoordinasikan secara sistimatis usaha – usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistimatis.

Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Intasi Pemerintah) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan untuk lima tahun sesuai dengan periode Kepemimpinan Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tatacara Penyusunan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, RPJMD merupakan bagian Integral Rencana Pembangunan Nasional.

RPJMD Tahun 2021-2026 secara umum bertujuan untuk memberikan arah dan tututan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun. Secara khusus, RPJMD bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan menjadi pedoman

dalam penyusunan Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

## 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Merujuk kepada Visi tersebut, maka Visi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yaitu: **“MEMBANGKIT BATANG TARANDAM, MENJADIKAN KABUPATEN SOLOK TERBAIK DI SUMATERA BARAT.”**

Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Hal ini juga ditunjang oleh pemerintahan yang baik dengan terselenggaranya prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, demokratis, akuntabel, efisien, responsif, penegakan hukum, berorientasi pada membangun konsensus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang baik ( *good governance* ) ditunjukkan oleh birokrasi yang secara aktif melakukan intervensi di wilayah hulu sehingga tercipta situasi persaingan yang lebih adil.

## 2. Misi

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 dirumuskan Dalam Misi Kabupaten Solok tersebut Satpol PP dan Damkar melaksanakan misi No 4 RPJMD Kabupaten Solok tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih.

## 3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implemementasi dari ditetapkan Visi dan Misi RPJMD jangka menengah 2021-2026 yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan misi Nomor 4 (lima) RPJMD yaitu ***Mewujudkan Penyelenggaraan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih***”



Dari visi dan misi tersebut, terdapat (2) dua **tujuan** besar yang ingin dicapai selama tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Birokrasi.

#### **4. Sasaran**

Berdasarkan konsep diatas, sasaran utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok adalah :

1. Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran
3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Solok pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujun/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,24	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65
		Peningkatan ketentraman dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100
			Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (limnas)	87,97	88,51	89,19	90,54	91,89	91,89
		Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten /kota	44,44	44,44	55,55	66,66	66,66	66,66
Persentase Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100		100	100	100	100	100		
2	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB) 77	(BB) 78	(BB) 79	(A) 80	(A) 81	(A) 82
		Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,75	2,80	3,24	3,34	3,53

## B. Indikator Kinerja Utama

Pada dasarnya rencana kinerja (Performance Plan) Tahun 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok selama Tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kualitatif yang harus dicapai selama Tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan umpan balik dalam mengukur keberhasilan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok pada Tahun 2021.

Berikut tabel Kinerja Utama, dan Formulasi Pengukuran beserta kriteria indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Solok Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama, dan Formulasi Pengukuran Satpol  
PP dan Damkar Tahun 2021

No	Sasaran Trategis	Inikator Kinerja Utama	Satu an	Formulasi cara pengukuran	Sumber data	Keterangan
1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	Nilai rata-rata unsur pelayanan	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran IKM dilakukan melalui hasil survei 9 kriteria SKM oleh pihak internal
		Persentase penegakan Perda	%	Jumlah laporan pelanggaran yang <u>deselesaikan</u> x 100% Jumlah laporan pelanggaran	Satpol PP dan Damkar	Penyelesaian Pelanggaran Perda melalui cara Penertiban dan Pembinaan serta Pembongkaran.
		Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat	%	Jumlah Linmas yang <u>ada</u> X 100% Jumlah target Linmas	Satpol PP dan Damkar	Kriterianya adalah jumlah linmas yang ada/aktif yang sesuai dengan surat keputusan Bupati

2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota	%	Jumlah Pos <u>Pelayanan</u> X 100% Jumlah penanganan kebakaran dalam WMK	Satpol PP dan Damkar	Kriterianya adalah Pos Pemadam yang ada sekarang
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	%	Jumlah layanan pemadam kebakaran dalam tingkat waktu Tanggap oleh pemadam kebakaran dan Relawan kebakaran <u>Jumlah seluruh</u> kejadian Kebakaran	Satpol PP dan Damkar	Layanan pemadam kebakaran yang dilakukan oleh Pemadam Kebakaran dan kelompok siaga kebakaran
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pem	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai	Jumlah Nilai akuntabilitas Kinerja SKPD	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran nilai akuntabilitas kinerja oleh Inpektorat Kab.Solok.
		Indeks Kepuasan Aparatur	Nilai	Nilai Indeks kepuasan Aparatur	Satpol PP dan Damkar	Pengukuran Nilai kepuasan aparatur oleh pihak internal Satpol PP dan Damkar

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama SKPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,24	3,45	3,51	3,55	3,60	3,65	3,65
2.	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (limnas)	87,97	88,51	89,19	90,54	91,89	91,89	91,89
4.	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten /kota	44,44	44,44	55,55	66,66	66,66	66,66	66,66
5.	Persentase Tingkat waktu tanggap ( response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	100	100	100	100	100	100
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar	77 (BB)	78 (BB)	79 (BB)	80 (A)	81 (A)	82 (A)	82(A)
7.	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,75	2,80	3,24	3,34	3,53	3,53

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja sebagai perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumbu brdana

terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengelola Program dan kegiatan instansi akan lebih baik. Penyusunan Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021-2026, rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan Renja Tahun 2021, Satpol PP dan Damkar Tahun 2021. Untuk melaksanakan kinerja tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran didukung dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan terlihat pada tabel 2.4 sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	JUMLAH
<b>Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.748.469.9180</b>
<b>Kegiatan :</b> Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
<b>Sub kegiatan</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79.312.000
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Keuangan daerah	
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.217.761.528
<b>Kegiatan :</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.482.500
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.967.000
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.154.500
<b>Sub kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.004.500
<b>Kegiatan :</b> Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	
<b>Sub kegiatan</b> Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.250.000
<b>Kegiatan :</b> Penyediaan jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.800.000
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.338.152
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.800.000
<b>Kegiatan :</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
<b>Sub kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>222.650.000</b>
<b>Sub kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>5.739.000</b>
<b>Sub kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya	<b>12.210.000</b>
<b>PROGRAM : Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>2.440.339.450</b>
<b>Kegiatan :</b> Penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

<b>Sub kegiatan</b> Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman dan Pengawasan	2.372.288.500
<b>Sub kegiatan</b> Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.613.500
<b>Sub kegiatan</b> Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.437.450
<b>Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota</b>	<b>2.192.922.500</b>
<b>Kegiatan :</b> Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan racun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	
<b>Sub kegiatan</b> Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	2.166.482.500
<b>Kegiatan :</b> Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan Kebakaran	
<b>Sub kegiatan</b> Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	26.440.000

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021 :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Persentase Penegakan Perda - Persentase Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat	3,24 100 87,97
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	- Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam kabupaten/kota - Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)	44,44 100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Indeks Kepuasan Aparatur	77(BB) 2,51

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Solok yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

#### **Kerangka Pengukuran Kinerja**

Untuk mempermudah Interpretasi atas pencapaian sasaran dan program /kegiatan serta Indikator Makro diberlakukan nilai serta makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Capaian Kinerja**

<b>No.</b>	<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Kategori Capaian kinerja</b>
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah



## A. Capaian Kinerja

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran telah melaksanakan fungsi dan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Solok tahun 2021-2026, Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan, dan tingkat capaian indikator kinerja instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam rencana kerja kinerja, pengukuran capaian sasaran kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran tahun 2021 mengalami perubahan sebagai berikut:

### 1. Realisasi Capaian Kinerja IKU satpol PP dan Damkar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran Strategis
Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

#### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok adalah Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan pemadam kebakaran, hasil Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dilakukan dengan penyebaran Kuisioner pada masyarakat yang memperoleh pelayanan oleh Satpol PP dan Damkar yang dilakukan pada Bulan September s/d Oktober 2021. Hasil survey pelayanan yang diberikan dikatakan Sangat Baik, unsur pelayanan tertinggi diperoleh oleh unsur biaya/tarif yaitu unsur persyaratan sangat mudah diakses dan tidak memerlukan biaya.

## A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP dan Damkar dapat diukur dengan Formulasi Pengukuran IKM :

### Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan

Realisasi pencapaian target IKM tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.1  
Indeks Kepuasan Aparatur (IKM)

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,24	3,58	110%

*Sumber data; Satpol PP dan Damkar Tahun 2021*

Tingkat Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dengan capaian kinerja melebihi target dari target 3,24 dengan realisasi 3,58 atau capaian 110%.

Berikut tabel nilai interval Tingkat Kinerja penyelenggaraan pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2021, hasil survey menunjukkan bahwa harapan dan kebutuhan pelayanan yang dilakukan Satpol PP dan Damkar memperlihatkan pendapat dari masyarakat dalam perolehan pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dikatakan sangat " BAIK"

Nilai Unsur pelayanan tahun 2021 dengan pencapaian nilai sebesar 3,58 dari taget 3,24 pencapaian 110%. Pencapaian Nilai IKM yang sangat Baik diperoleh dengan memperbaiki kriterian Pelayanan, berikut tabel Nilai Persepsi IKM, Nilai Interval, Nilai konversi IKM, Mutu Pelayanan kinerja unit pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53224-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Beriku ini adalah Nilai Unsur Pelayanan yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 pada tabel 3.1.4 berikut :

Tabel 3,1.4  
Nilai Unsur Pelayanan

No	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM
1.	Persyaratan	3,25
	Sistem, Mekanisme dan prosedur	3,75
	Waktu penyelesaian	3,75
	Biaya/tarif	4,00
	Produk spesifikasi jenis layanan	3,25
	Kompetensi pelaksana	3,38
	Perilaku pelaksana	3,53
	Sarana dan prasarana	3,25
	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,50
	Nilai rata-rata	3,58

Sumber data: Satpol PP dan Damkar tahun 2021

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERARAPA TAHUN TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD/RENSTRA**

Indikator Indek Kepuasan Masyarakat ini merupakan Indikator kinerja Daerah pada RPJMD tahun 2021-2016 dan dituangkan pada Renstra OPD tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Kepuasan Masyarakat (IKM) ini baru tahun 1 (pertama) Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok tahun 2021-2026, Perkembangan capaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat belum dapat di tampilkan karena pada periode Rasntra tahun 2016 -2021 belum menjadi indiktor kinerja utama OPD.

### **C. ANALISA PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Realisasi capaian kinerja melebihi dari target, namun pelaksanaan kegiatan Pelayanan oleh Unit Kerja masih belum maksimal berikut Faktor-faktor Penghambat peningkatan kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat :

- Masih kurangnya SDM yang berkualitas dalam pengelolaan Survey kepuasan masyarakat
- Masih kurangnya pemamfaatan Teknologi informasi dalam pelayanan Publik terhadap masyarakat.

Solusi Untuk meningkat pencapai kinerja menjadi lebih baik lagi dan memaksimalkan Pelayanan pada masyarakat perlu dilakukan :

- Melakukan perbaikan-perbaikan baik kuantitas maupun kualitas SDM pada Satpol PP dan Damkar
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang (Gedung, kendaraan dan Prasarana kantor) dalam upaya memberikan Pelayanan.

### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Pelayanan Publik yang efektif jika masyarakat memperoleh layanan dengan mudah dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, cepat dan memuaskan. Berikut faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi pelayanan :

1. Struktur Organisasi yang menerapkan tingkat pembagian kerja dan komponen Struktur organisasi yang mempengaruhi kualitas pelayanan.

2. Kemampuan SDM Aparatur Pemerintah yang berkualitas dalam melakukan pelayanan
3. Meningkatkan sistim informasi pelayanan publik.

Untuk meningkatkan efisiensi menjamin terselenggaranya Pelayanan terhadap masyarakat dengan menggunakan Sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab dan tranparansi.

#### E. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Sasaran Stategis Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Pencapaian target Indikator ini dengan dukungan Program dan kegiatan pada tabel 3.1.5 sebagai beriku :

Tabel 3.1.5  
Program dan kegiatan indikator sasaran 1  
Peningkatan Kerentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,24	3,58	110%	Program: Peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan • Kegiatan: Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/kota	2.440.339.450	2.148.497.152	95,94%
Capaian Indikator						110%				<b>95,94%</b>
Tingkat efisiensi						157%				
Tingkat Efektifitas						133%				

## F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN /PERBAIKAN

Rencana Tindak Perbaikan untuk Peningkatan pencapaian target Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi lebih baik lagi dengan melakukan :

Meningkatkan pelayanan Publik terutama meningkatkan perilaku petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penegak Perda dan Perkada serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

### 2. Indikator Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok yaitu menekankan pada penegakan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Solok.

### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Persentase Penegakan Perda dapat diukur dengan Formulasi Pengukuran kinerja sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran Perda yang dilaporkan}} \times 100\%$$

$$\frac{80}{80} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi pencapaian target Persentase Penegakan Perda tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.1  
Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
2.	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100%

Sumber data: Satpol PP dan Damkar 2021

Dari tabel diatas didapat realisasi pencapaian target kinerja pada tahun 2021 sebesar 100%

Jumlah Pelanggaran Perda yang dilaporkan pada Satpol PP dan Damkar Tahun 2021 Sebanyak 80 Pelanggaran dan semua pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan penertiban Non Yustisial dengan capaian kinerja 100%. jadi Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2021 adalah 100%.

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BERARAPA TAHUN TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD / RENSTRA.**

Perkembangan capaian target kinerja Indikator Persentase Penegakan Perda dapat dilihat pada tabel 3.2.2 berikut :



Tabel 3.2.2  
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 s/d 2021

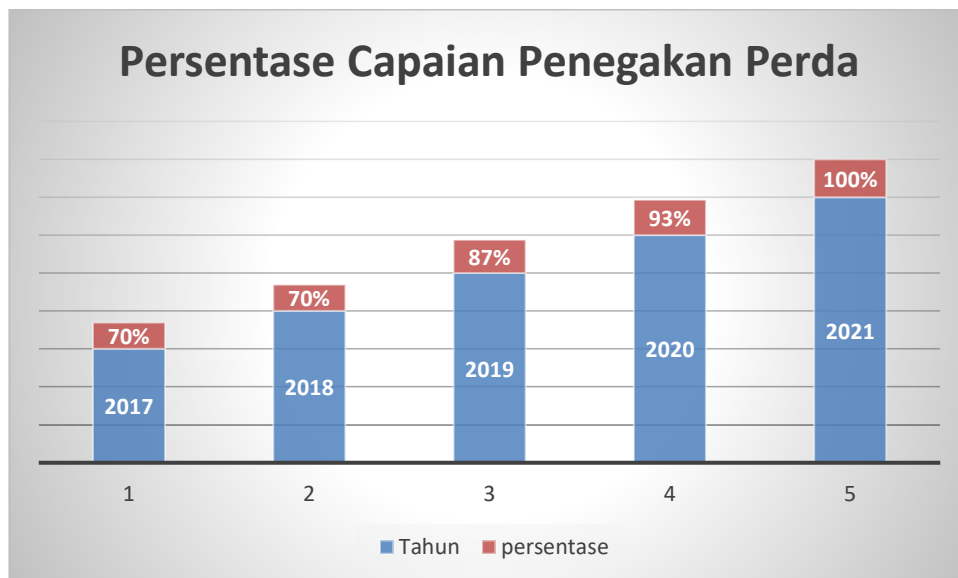
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian					Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	70	70	88,67	93	100	70%	70%	88,67 %	93%	100%	100	100%

Perkembangan targer kinerja Penegakan Perda pada tahun -tahun sebelumnya sebagai berikut

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja 70%.
- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2019 capaian kinerja 87%.
- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2020 capaian kinerja 93%
- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2021 capaian kinerja 100%.

Persentase Capaian Penegakan Perda dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1  
Persentase Penegakan Perda



Bentuk-bentuk Pelanggaran Perda dan Perkada serta Gangguan Trantibum (Ketentraman ketertiban umum) yang terjadi dalam tahun 2021:

*Bentuk – bentuk pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2021 sebagai berikut :*

1. Masih terdapatnya masyarakat yang tidak mengindahkan Perda Ketentra- man dan ketertiban umum Nomor 9 Tahun 2019 seperti Indikasi penyakit masyarakat ( perbatan asusila)
2. Pengembangan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengem- bang sebelum izin pembangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Dae- rah (Perbup Nomor 38 tahun 2018 tentang Mekanisme penyelenggaraan izin pemamfaatan ruang)

3. Penertiban bangunan tanpa izin /IMB (Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung)
4. Penertiban pelajar yang berkeliaran pada saat jam pelajaran.

*Gangguan Trantibum (Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat)*

Disamping melakukan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pedamam kabakaran juga melakukan penertiban terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dalam tahun 2021 masih masa pandemi Covid-19. Berikut penertiban yang dilakukan :

1. Penertiban pelajar yang berkeliaran pada saat jam pelajaran dirumah
2. Melakukan Penertiban terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan pencegahan penanggulangan Covid-19 (Tidak memakai masker, menghindari kerumunan dan sering cuci tangan ) dengan melakukan sosialisasi dan penertiban ke Pasar-pasar dan tempat-tempat objek wisata serta tempat keramaian lainnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 360-235-2020 tentang Penetapan status darurat wabah corona virus Disesase 2019.
3. Melaksanakan penertiban dan pengawasan penerapan Tatanan Hidup Baru (New Normal) yang produktif dari Covid-19 sesuai dengan Instruksi Bupati Solok Nomor 300/89/Satpol PP Damkar-2020 tentang Tatanan kehidupan New Normal
4. Melakukan penertiban dan pengawasan penerpan hukum Protokol kesehatan terhadap masyarakat sesuai dengan Perda No 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan hidup baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona virus disease 2019.
5. Melaksanakan penertiban papan Iklan/spanduk yang tidak sesuai aturan di Wilayah Kabupaten Solok.

Upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dalam mengurangi pelanggaran Perda dan Perkada adalah dengan pemberian teguran Lisan bagi para pelanggar dan pemberian teguran tertulis berupa surat pernyataan bagi para pelajar yang terjaring penertiban dan memberikan pembinaan dan sosialisasi Perda pada masyarakat.

### **C. ANALISIS PENYEBAB KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN**

Secara umum pencapaian kinerja Persentase Penegakan Perda sudah sangat Baik, Namun Pelaksanaan penertiban masih belum optimal atau masih belum maksimal hal ini disebabkan oleh antara lain:

1. Masih kurangnya kapasitas dan SDM aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan Fungsi
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah yang berlaku
3. Masih rendahnya Aparatur yang mendapat pelatihan dasar dan Diklat PPNS
4. Masih belum terbentuknya Sekretariat Bersama PPNS Kabupaten Solok
5. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol PP.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja Persentase Penegakan Perda antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Satpol PP dan Damkar dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan pendidikan
2. Melakukan sosialisasi (Perda Trantibum) sebagai Payung Hukum bagi aparatur Satpol PP dan Damkar dalam melaksanakan tugas
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama bersama TNI dan Polri dan OPD terkait dalam melaksanakan Penegakan Peraturan Daerah
4. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional Satpol PP
5. Tahun 2021 masih dalam masa pandemi Covid-19 Satpol PP dan Damkar meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam rangka pengawasan penerapan Hukum protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 di wilayah kabupsten Solok.

### **D. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIEN PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Efektifitas untuk meningkatkan pencapaian kinerja Persentase Penegakan Perda di kabupaten Solok dilakukan dengan :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Patroli pada daerah yang dianggap rawan/ berpotensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait

3. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pada para pelanggar Perda dan Perkada bersama dengan SKPD terkait
4. Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri dalam Pelaksanaan Patroli Penyakit Masyarakat.

Dan melakukan efisiensi terhadap sumber daya Pol PP antara lain :

1. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang operasional Satgas Pol PP
2. Meningkatkan kapasitas aparatur dan PPNS Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah dan pencegahan tindakan kriminal.

#### E. PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Program dan Kegiatan serta anggaran penunjang untuk pencapaian target Sasaran Strategis Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan Indikator kinerja Persentase Penegkan Perda terlihat pada tabel 3.2.3 berikut:

Tabel 3.2.3  
Program dan kegiatan indikator sasaran 1  
Peningkatan Terentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100	100	100%	<b>Program:</b> Peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.372.288.500	2.118.875.652	94,53
							<b>Kegiatan:</b> Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/ kota			89,32%
							<b>Sub kegiatan</b> Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	42.437.450	442.435.250	99,74%
Capaian Indikator						100%				<b>94,53%</b>
Tingkat efisiensi						98%				
Tingkat Efektifitas						100%				

Sumber data : Satpol PP dan Damkar tahun 2021

## F. RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Rencana tindak lanjut perbaikan yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja Persentase Penegakan Perda sebagai berikut :

1. Perlu Penambahan Kendaraan Patroli yang handal yang sesuai standar SOP mengingat luas wilayah kabupaten Solok
2. Memaksimalkan Sarana dan Prasarana yang ada dan meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
3. Meningkatkan Fungsi Kasi Trantib Kecamatan sebagai Ek offisio Satpol PP.

### 3. *Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat*

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Solok dalam menciptakan suatu kondisi yang aman, tentram dan tertib berupaya melakukan pembinaan dan pendataan terhadap Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas yang berada pada Nagari di seluruh Kecamatan se kabupaten Solok.

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI  
Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat diatas didapat capaian kinerja sebesar 88,64% dengan Formulasi pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah linmas yang ada}}{\text{Jumlah target linmas}} \times 100\%$$
$$\frac{656}{740} \times 100\% = 88,64\%$$

Realisasi pencapaian target Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :

Tabel 3.3.1

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
3.	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (limnas)	87,97	88,64	88,64%

Sumber data :Satpol PP dan Damkar tahun 2021

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa capaian terget kinerja Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan.

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DDENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAHKIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD /RENSTRA**

Perbandingan Penegakan Perda pada tahun -tahun sebelumnya sebagai berikut :

- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2017 dan 2018 capaian kinerja 70%.
- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2019 capaian kinerja 87%.
- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2020 capaian kinerja 93%
- Persentase Penegakan Perda pada Tahun 2021 capaian kinerja 100%.

Perkembangan capaian kinerja Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat dilihat pada tabel 3.3.2 berikut :

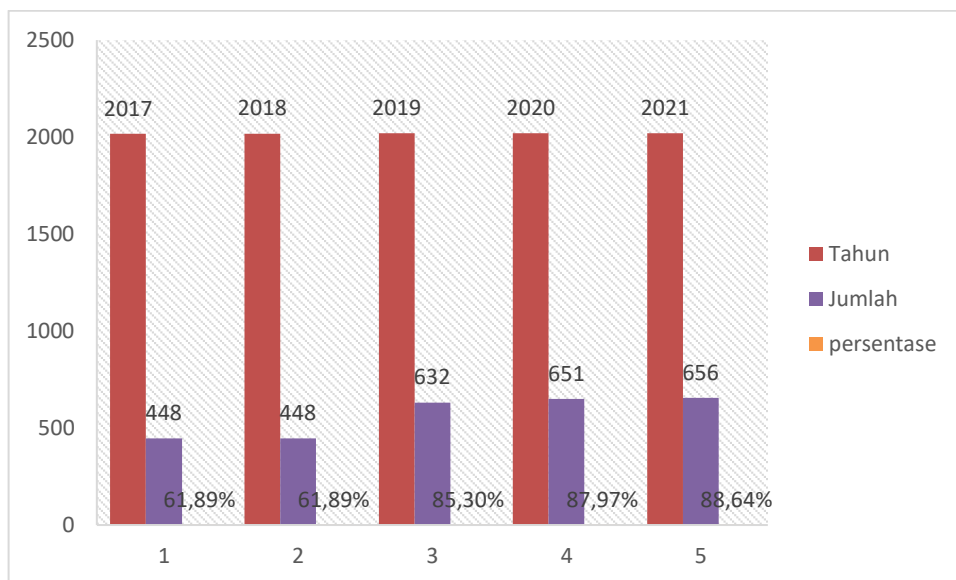


Tabel 3.3.2  
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 s/d 2021  
(Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian					Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
3	Persentase cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	61,89	61,89	80	80	87,97	61,89	61,89	85,40	87,90	88,51	61,89	61,89	85,40	87,97	88,64	88,64	88,64%

Dari tabel diatas dapat digambarkan pencapaian kinerja pada gambar 3.2 berikut :

Gambar 3.2  
Persentase Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat



### C. ANALISIS PENYEBAB HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Capaian kinerja sasaran strategis Peningkatan ketentraman dan ketertibsn umum serta Perlindungan Masyarakat dengan Indikator kinerja Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat diukur dengan terkendalnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, namun pelaksanaan belum terlaksana maksimal, Hal-hal yang menghambat capaian kinerja :

1. Masih kurangnya Rekrumen anggota Satlinmas Nagari
2. Adanya anggota Satlinmas Nagari yang meninggal dan usia sudah lanjut
3. Kurangnya motifasi Pemerintah Nagari untuk penambahan anggota Satlinmas Nagari sesuai dengan Permendagri Nomor 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja Cakupan Petugas Pelindungan masyarakat :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Satlinmas Nagari dengan Pembinaan dan Penyluhan.

2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari agar melakukan perekrutan anggota Linmas baru di Nagari.

#### D. ANALISIS ATAS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan pada masyarakat perlu melakukan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dengan melakukan peningkatan kemampuan dan keterampilan anggota linmas untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan anggota Satlinmas.

#### E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Program dan kegiatan penunjang capaian kinerja Sasaran strategis yaitu Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan indikator sasaran Persentase Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat sebagaimana pada tabel 3.3.4 berikut :

Tabel 3.3.4  
Program dan kegiatan indikator sasaran  
Peningkatan Terentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat	(651 org) 87,97%	(656 org) 88,64%	88,64%	<b>Program:</b> Peningkatan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan <b>Kegiatan:</b> Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/ kota <b>Sug kegiatan</b> Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	25.613.500	25.296.250	98,76%
Capaian Indikator						88,64%				<b>98,64%</b>
Tingkat efisiensi						94%				
Tingkat Efektifitas						100%				

#### F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/PERBAIKAN

Rencana tindak lanjut Peningkatan capaian kinerja Cakupan Petugas perlindungan Masyarakat dengan melakukan :

1. Peningkatan sinergitas yang terjalin dengan baik antara Satpol PP dengan anggota Satlinmas Nagari
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintahan Nagari dan Kasi Trantib Kecamatan
3. Melaksanakan Pembinaan, Sosialisasi terhadap Anggota Satlinmas nagari tentang Tugas dan Fungsi linmas Nagari  
Serta meningkatkan peran linmas dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat di Nagari.

Tujuan Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketahanan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran

#### 4. *Indikator kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota*

Pelayanan penanganan kejadian kebakaran yang dilakukan Pemadam kebakaran kabupaten Solok pada tahun 2021 yang dilakukan dalam wilayah Manajemen kebakaran (WMK) kabupaten Solok.

**A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA INI**  
Persentase Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran dalam kabupaten/Kota merupakan tahun 1 Renstra Satpol PP dan Damkar tahun 2021-2026 dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 100%. Formulasi Pengukuran sebagai berikut :

**$\frac{\text{Jumlah Pos Pelayanan kebakaran yang ada}}{\text{Penanganan kebakaran dalam WMK}} \times 100\%$**

$$\frac{44,44}{44,44} \times 100\% = 100\%$$

Realisasi Pencapaian Kinerja Persentase Pelayanan bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota terlihat pada tabel 3.4.1 berikut :

Tabel 3.4.1

## Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
4.	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten /kota	44,44	44,44	100%

Sumber Data: Satpol PP dan Damkatr tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2021 capaian indikator kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD/RENSTRA**

Perbandingan capaian kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam kab/kota dari tahun 2017 s/d 2020 terlihat pada tabel 3.4.2 sebagai berikut :

Tabel 3.4.2  
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian					Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
4	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran dalam kabupaten /kota	%	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	44,44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data: Satpol PP dan Damkar tahun 2021

Dari tabel diatas didapat bahwa perbandingan capaian Indikator kinerja Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam kab/kota tahun 2017 s/d 2021 rata-rata capaian sebesar 100%.

Tabel 3.4.3  
Program dan kegiatan indikator sasaran  
Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan Pelayanan bencana kebakaran dalam Kabupaten/Kota	100%	100	100 %	Program: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.166.482.500	2.033.576.367	93,87%
						Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota				
							Sub Kegiatan : Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota	2.166.482.500	2.033.576.367	93,87%
Capaian Indikator						100%				<b>93,87%</b>
Tingkat efisiensi						97%				
Tingkat Efektifitas						100%				



### C. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN PERBAIKAN

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk memperbaiki kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dalam Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

1. Perlu penambahan kendaraan armada pemadam kebakaran serta Pos Pelayanan Kebakaran sesuai dengan WMK (9 wilayah)
2. Meningkatkan kualitas Aparatur Satlinmas Pemadam Kebakaran
3. Meningkatkan kualitas apatur Pemadam kebakaran Meningkatkan Pendidikan dan Pelatihan teknis satuan tugas Pemadam kebakaran secara bertahap dan Kontinu.

### D. *Persentase Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK)*

Rata – rata waktu tingkat tanggap penanganan kejadian kebakaran yang dihitung dari resepon laporan dari masyarakat sampai dengan sampai di lokasi kejadian kebakaran yaitu sebesar 5 Menit dari target SOP 10 Manit (100%).

### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TREALISASI KINERJA TAHUN INI

Realisasi pencapaian target indikator kinerja Persentase Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) sebesar 150 % dengan formulasi pengukuran :

$$\frac{\text{Target- (realisasi-target)}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$10-(5-10) \quad 100 \quad = \quad 15 \quad \times \quad 100 \quad = \quad 150\%$$

ealisasi pencapaian kinerja terlihat pada tabel 3.5.1 sebagai berikut :

Tabel 3.5.1

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
5.	Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100	150	150%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kab.solok tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas pencapaian target kinerja sudah melebihi dari target yang ditetapkan.

B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD / RENSTRA

Perkembangan capaian target kinerja Persentase Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) pada tabel 3.5.2 berikut :

Tabel 3.5.2  
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target					Realisasi					% Capaian					Target 2021 Renstra	% Capaian Renstra
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
5	Persentase Tingkat waktu tanggap ( response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	%	100	100	100	100	100	75	75	86	120	150	75	75	86	120	150%	150	150%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Tingkat Waktu tanggap (response time rate) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) di Kabupaten Solok rata-rata mengalami peningkatan pencapaian kinerja sebesar 13 menit.

### C. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Capaian Kinerja dengan indikator Persentase Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK).

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pencapaian kinerja didukung oleh

1. Telah adanya tersedia Alat Pemadam Api (APAR) pada tempat/gedung walaupun belum semua tempat/gedung yang mempunyai APAR
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kejadian kebakaran pada tiap Nagari.

Namun secara keseluruhan pelayanan penanganan kejadian kebakaran masih belum maksimal.

Hal-hal penyebab belum maksimalnya pelayanan penanganan kejadian kebakaran sebagai berikut :

1. Jarak Kejadian kebakaran yang cukup jauh dari pos pelayanan kebakaran / WMK
2. Luas wilayah manajemen kebakaran yang berpotensi kebakaran tidak sebanding dengan pos pelayanan kebakaran yang ada (4 WMK yang terbentuk) dari seluruh WMK 9 wilayah
3. Jarak tempuh atau kondisi jalan yang rusak dan tidak bisa ditempuh dengan kecepatan maksimal sesuai dengan SPM (1-5 menit per kilo meter)
4. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Solusi yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja

1. Melakukan pengembangan luas wilayah manajemen kebakaran
2. Penambahan sarana dan prasarana pendukung operasional pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Meningkatkan kualitas aparatur Satgas Pemadam kebakaran
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka penanganan kebakaran dengan membentuk relawan kebakaran di nagari se kabupaten Solok.

#### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk peningkatan pencapaian target kinerja Persentase Tingkat waktu tanggap ( response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) dilakukan dengan lebih mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dengan melakukan

1. Meningkatkan pencegahan dini bahaya kebakaran dengan melakukan sosialisasi, simulasi pencegahan bahaya kebakaran pada masyarakat
2. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan Satgas pemadam kebakaran.

#### E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Program dan kegiatan dan Sub Kegiatan Sasaran Strategis dengan indikator kinerja Tingkat waktu tanggap ( response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada tabel 5.5.5 berikut :

Tabel 3.5.5  
Program dan kegiatan indikator sasaran 2  
Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Tingkat waktu tanggap response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	100%	150	150%	<p>Program: Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran melalui Sosialisasi dan edukasi masyarakat</p>	26.440.000	26.414.200	99,90%
Capaian Indikator						150%				<b>96,88%</b>
Tingkat efisiensi						100%				
Tingkat Efektifitas						97%				

*Sumber data : Satpol PP dan Damkar kab.Solok tahun 2021*

## F. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN/ PERBAIKAN

Frencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja akan melakukan sebagai berikut:

1. Perlu penambahan kendaraan armada pemadam kebakaran sesuai dengan WMK (9 wilayah)
2. Memaksimalkan Kondisi yang ada secara efektifitas dan Efisien
3. Meningkatkan kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran sesuai dengan standar kualifikasi
4. Meningkatkan pendidikan dan Pelatihan teknis Satuan tugas Pemadam kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan .

Tujuan Meningkatkan Akuntabilitas dan kinerja SKPD
Saran Strategis
Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum dan Pemadam kebakaran

### 6. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas kinerja ini baru tahun pertama pada Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang sebelumnya belum periode Renstra 2016-2020 belum menjadi indikator kinerja OPD.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Pemadam kebakaran kabupaten Solok untuk Tahun 2021 belum diketahui nilainya karena untuk penilaian tahun 2021 masih dalam proses penyusunan laporan LKJIP dan penyiapan dokumen Sakip tahun 2021.

## A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TREALISASI KINERJA TAHUN INI

Berikut tabel capaian kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD Satpol PP dan Damkar tahun 2021 sebagai kerikut:

Tabel 3.6.1

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
6.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar	77 (BB)	NA	NA

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2021 belum diketahui nilainya karena masih dalam proses penyusunan LKjIP dan Dokumen SAKIP tahun 2021. Adapun nanti hasil formulasi pengukuran kinerja Akuntabilitas Kinerja SKPD ini adalah : **Jumlah Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD** yang diperoleh dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD / RENSTRA**

Realisasi Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD belum dapat ditampilkan karena belum tersedia target pembandingan dari tahun 2017 s/d 2020 karena belum menjadi indikator Utama kinerja OPD.

Berikut adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD yang diperoleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dari tahun 2017 s/d 2020 :

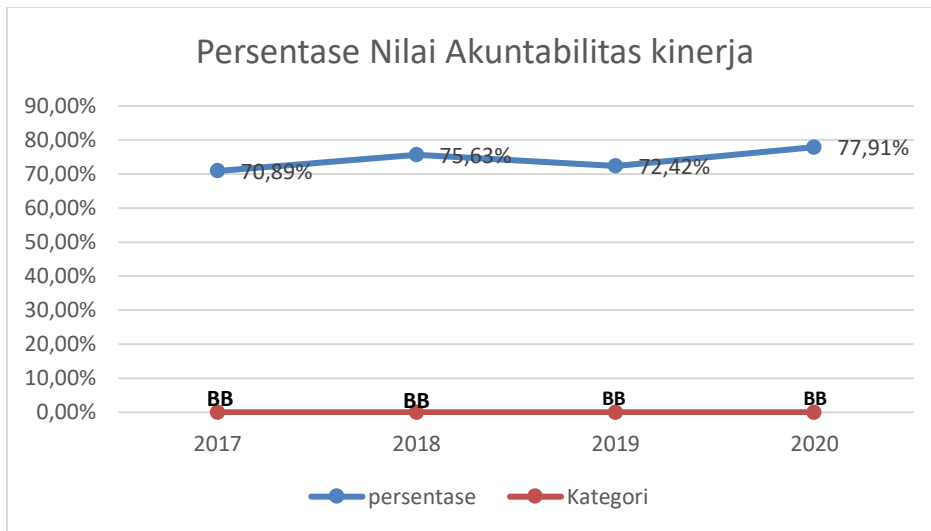
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2017 sebesar 70,89% kategori BB
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2018 sebesar 75,64% kategori BB
5. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2019 sebesar 72,42% kategori BB
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun 2020 sebesar 77,91% kategori BB.

Untuk lebih jelasnya nilai capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok dari tahun 2017 s/d 2020 dilihat pada Gambar 3.3 berikut:

**Gambar 3.3**

**Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar**





### C. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan hasil penilaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Damkar dari tahun 2017 s/d 2020 dikategorikan Sangat Baik. Akan tetapi masih ada faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi secara berkala
2. Rencana aksi yang masih belum terlaksana secara maksimal.
3. Pengumpulan data kinerja belum secara berkala.

Solusi yang akan dilakukan :

1. Melakukan perbaikan pengukuran kinerja
2. Meningkatkan budaya kerja yang positif bagi ASN Satpol PP dan Damkar
3. Memaksimalkan sumber daya yang ada.
4. Meningkatkan pengumpulan data dokumen kinerja secara berkala.

### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi dalam penyelenggaraan peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja pada Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan potensi dan aneka ragam sumber daya pada Satpol PP dan Damkar kabupaten Solok.

### E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Program, kegiatan dan Sub kegiatan penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran dengan

Indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tabel 3.6.2 dengan pencapaian realisasi Nilai Akuntabilitas kinerja keadaan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.6.2  
Proram dan kegiatan Indikator Sasaran 3  
Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran

	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja	(BB) 77	77,91	77,91 %	<b>Program:</b> <b>Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b> Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD	79.312.000	79.244.500	<b>99,91</b>
Capaian Indikator						77,91%				<b>99,91%</b>
Tingkat efisiensi						88,91%				
Tingkat Efektifitas						100%				

## F. LANJUT PENINGKATAN/ PERBAIKAN

Untuk meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dilakukan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyajian informasi lapooran melalui teknologi informasi
2. Meningkatkan mekanisme pengumpulan data kinerja dan rencana aksi secara berkala (Bulanan, Triwulan dan Semester)
3. Peningkatkan kegiatan sesuai dengan rencana aksi.

### 7.Indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan yang dilakukan oleh sekretariat Satpol PP dan Damkar terhadap apatur pada bidang Penegakan Perda, bidang Ketentraman dan ketertiban umum, bidang Perlindungan masyarakat dan bidang Pemadam kebakaran.

#### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN TREALISASI KINERJA TAHUN INI

Berikut tabel capaian kinerja Indeks Kepuasan Aparatur Satpol PP dan Damkar tahun 2021 terlihat pada tabel 3.7.1 berikut :

Tabel 3.7.1

Indikator Utama, Target dan Realisasi Satpol PP dan Damkar Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase capaian
7.	Indexs Kepuasan Aparatur	2,51	3,69	147%

Sumber data: Satpol PP dan Damkar tahun 2021

Dari tabel diatas dilelaskan bahwa realisasi capaian kinerja Indeks kepuasan Aparatur sebesar 3,69% atau 147 %. Formulasi pengukuran kinerja :

#### Nilai Rata-rata unsur pelayanan kesekretariatan

Capaian kinerja Indeks kepuasan apatur tahun 2021 adalah 3,69 dengan kategori "SANGAT BAIK." Berikut tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Konversi dan Mutu Pelayanan unit kerja pada tabel 3.7.2 sebagai berikut :

Tabel 3.7.2

Nilai Persepsi,Nilai Interval IKM,Nilai Konversi IKM,Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53224-4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Beriku ini adalah Nilai Unsur Pelayanan yang dicapai oleh Satpol PP dan Damkar kabupen Solok tahun 2021 pada tabel 3.7.3 berikut:

Tabel 3.7.3  
Nilai Unsur Pelayanan Kesekretariatan

No	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI IKM
1.	Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang	3,25
2.	Bidang Sekretariat dapat menyediakan Barang cetakan sebagai penunjangkegiatan bidang	3,75
3.	Sarana dan Prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasinal dll)	3,75
4.	Kebersihasilan dan kenyamanan kantor sudah baik	4,00
5.	Akses Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang sekretariat sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik	3,25
6.	Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat gaji berkala dll) ASN dapat terpenuhi dengan baik	3,38
7.	Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik	3,53
8.	Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik	3,25
9.	Kecepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan)	3,50
10.	Fasilitas ruang rapat sudah baik	3,25
11.	Nilai rata-rata	3,69

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD / RENSTRA**

Indikator kinerja indeks kepuasan Aparatur merupakan tahun pertama Renstra 2021-2026, pada periode Renstra sebelumnya 2016-2021 Indikator kinerja indeks kepuasan aparatur ini belum ada. Jadi belum ada pembanding capaian kinerja tahun 2017 s/d 2020.-

### C. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN ATAU PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara keseluruhan capaian Kinerja Indeks kepuasan aparatur kesekretariatan Satpol PP dan Damkar dikategorikan Sangat Baik akan tetapi masih ada **faktor-faktor penghambat** pencapaian kinerja agar menjadi lebih baik lagi antara lain:

1. Masih kurangnya SDM aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan
2. Masih kurangnya manajemen aparatur dalam pemeliharaan
2. Keterbatasan aparatur dalam mengoperasikan komputer
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan terhadap bidang-bidang

Solusi yang dilakukan :

- 1.Meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
- 2.Meningkatkan kemampuan manajemen aparatur
- 3.Meningkatkan kemampuan aparatur dalam pengoperasinalkan komputer
- 4.Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan.

### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja Indeks Kepuasan Aparatur perlu melakukan Efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap aparatur pada bidang-bidang dengan memperhatikan aspek hubungan dan tata kerja pada Instansi pemerintah dengan memanfaatkan potensi dan aneka ragam sumber daya pada Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok.

### E. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Program, kegiatan dan Sub kegiatan penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman ketertiban umum dan pemadam kebakaran dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Aparatur pada tabel 3.6.3 tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.6.3  
Proram dan kegiatan Indikator Sasaran 3  
Meningkatnya kualitas Pelayanan Ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran

	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program dan kegiatan	Pagu dana	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51%	3,69	147%	<b>Program:</b> <b>Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b> Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah Sub Kegiatan: Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Sub Kegiatan Penyediaan logistik kantor Sub Kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan Sub kegiatan Penyelenggaraann rapat koordinasi dan Konslrasi SKPD Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan Penyediaan jasa suarat menyurat Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan	4.482.500 35.967.000 18.154.500 88.004.500 1.800.000 50.338.152 2.192.922.500	4.480.000 35.916.750 18.154.500 75.516.810 1.800.000 28.559.929 2.059.990.567	99,94 99,86 100% 85,81% 100% 56,74% 93,87

							Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	222.650.000	207.972.250	93,41%
							Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainya	5.739.000	5.739.000	100%
							Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12.210.000	12.210.000	100%
Capaian Indikator						147%				<b>92,96%</b>
Tingkat efisiensi						119,980%				
Tingkat Efektifitas						100%				



## F. Rencana tindak lanjut

1. Menyusun dan mengidentifikasi rencana kebutuhan barang untuk bidang-bidang
2. Meningkatkan mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana kebutuhan bidang.

## 4. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kabupaten Solok menganggarkan anggaran Belanja sebesar Rp.9.381.731.130 ( Sembilan milyar tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 Program 9 Kegiatan 21 Sub Kegiatan seperti tersaji dalam tabel 3.10 dibawah ini:

Tabel 3.10  
Realisasi anggaran

No	Urusan/ Bidang/Program kegiatan	Indikator kinerja Program/ Kegiatan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Anggaran	Kinerja	anggaran
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>		<b>100%</b>	<b>9.381.731.130</b>	<b>90,68</b>	<b>8.507.810.536</b>
<i>1</i>	<i>Program Pelayanan Aministrasi Per- kantoran</i>	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>100%</i>	<i>4.748.469.180</i>	<i>99,91%</i>	<i>4.291.322.817</i>
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daera</b>	<b>100%</b>	<b>79312.000</b>	<b>99,91%</b>	<b>79.244.500</b>
1	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dolkumen laporan capaian kinerja dan ihtiar realisasi kinerja SKPD	<b>4 Dokumen</b>	<b>79.312.000</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>79.244.500</b>
	Administrasi keuangan perangkat daerah	<b>Persentase terpenuhinya</b>	<b>100%</b>	4.217.761.528	<b>89,62%</b>	3.780.029.078

		<b>administrasi keuangan</b>				
2	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	<b>42 Orang</b>	4.217.761.538	<b>42 orang</b>	3.780.029.078
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	-	-	-	-
3	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	-	-	-	-
	Administrasi umum Perangkat Daerah	<b>Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	146.608.500	96,18%	134.068.060
4	Penyediaan komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik Penerangan bangunan kantor	<b>7 paket</b>	<b>4.480.000</b>	<b>7 Paket</b>	<b>4.480.000</b>
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor	<b>57 Paket</b>	<b>35.967.000</b>	<b>57 Paket</b>	<b>35.916.750</b>
6	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Jmlah Paket barang cdetakan dan penggandaan	<b>5 paket</b>	<b>18.154.500</b>	<b>5 Paket</b>	<b>18.154.500</b>
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	<b>12 laporan</b>	<b>88.004.500</b>	<b>12 laporan</b>	<b>75.516.810</b>
	Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	<b>100%</b>	<b>10.250.000</b>	<b>96,59%</b>	<b>9.900.000</b>
8	Pengadaan sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya	1 Unit Komputer	<b>100%</b>	<b>10.250.000</b>	<b>1 Unit</b>	<b>9.900.000</b>
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	<b>100%</b>	53.938.152	<b>85,58%</b>	32,159.929
9	Penyediaan jasa surat menyurat	Jmlah laporan surat menyurat	12 laporan	1.800.000	12 laporan	1.800.000
10	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	50.338.152	12 laporan	28.559.929
11	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan	1.800.000	1 laporan	1.800.000
	Pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah	100%	240.599.000	97,80%	225.921.250

12	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 unit	222.650.000,-	18 Unit	207.972.250
13	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana yang disediakan	12 laporan	5.739.000	12 laporan	5.739.000
13	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah laporan penyediaan alat tulis kantor	12 laporan	19.090.560	12 laporan	19.089.725
14	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana yang dipelihara	5 unit	8.000.000	5 unit	100%
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Ketertarikan ketertiban umum</b>	<b>Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>100%</b>	<b>2.440.339.450</b>	<b>95,94</b>	<b>2.186.497.152</b>
	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pelanggaran Perda dan Perkada	100%	2.440.339.450	100%	2.186.497.152
15	Pencegahan Gangguan ketertarikan fdan ketertiban umum melalui deteksi dini, cegah dini, Pembinaan, Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang didicegah melalui Deteksi dini,cegah dini, Pembinaan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	8 kasus	2.372.288.500	8 kasus	2.118.875.652
16	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketertarikan dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yg membuat hasil pemberdayaan masyarakat	2 dokumen	25.613.500	2 dokumen	25.296.250
17	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Azazi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	-
18	Kerja sama antar lembaga kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan	1 Dokumen	42.437.450	1 Dokumen	42.235.250

	Ketentraman dan ketertiban umum	kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan				
19	Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana yang Trantibum yang tersedia	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</b>	<b>Persentase Penanganan kebakaran, evakuasi kebakaran dan Non kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>2.192.922.500</b>	<b>96,88</b>	<b>2.059.990.567</b>
	Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan kejadian kebakaran dalam Kabupaten/Kota	10-0%	2.166.482.500	93,87	2.033.576.367
20	Pemadaman, dan Pengendalian kebakaran dalam Kab/Kota	Jumlah laporan kejadian kebakaran	40	2.166.482.500	64 kali	2.033.576.367
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Persentase pencegahan kebakaran	100%	26.440.000	99,90	26.414.200
21	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, edukasi Penanggulangan kebakaran	256 orang	26.440.000	256 orang	26.414.200

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama tahun 2021 yang dilengkapi dengan ringkasan capaian kinerja, LKjIP juga merupakan media sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan pihak-pihak terkait dalam melakukan instropeksi dan Refleksi dalam membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang, LKjIP juga menggambarkan keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mengemban tugas yang diberikan Kepala Daerah dan juga selanjutnya LKjIP digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan serta penyusunan Renja tahun berikutnya.

### **A. Kesimpulan**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Solok masih menemukan beberapa permasalahan yang di hadapi antara lain :

1. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap peratuarn perundang-undangan serta kesadaran dalam memelihara Ketentraman dan ketertiban di lingkungannya.
2. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penaggulangan kebakaran.
3. Belum Optimalnya sarana dan prasarana operasional Satpol PP dan Operasional Pemadam kebakaran.
4. Belum sebandingnya personil PPNS dengan jumlah penduduk.
5. Masih rendahnya kualitas sumberdaya anggota Linmas.
6. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparaturn pemadam kebakaran yang bersertifikasi Pemadam kebakaran.
7. Sarana dan Prasaran yang kurang memadai.

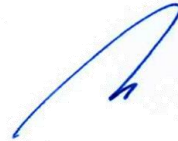
### **B. Saran-saran / Rekomendasi**

1. Dalam rangka mempertegas fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dalam bidang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran perlu kiranya memperkuat kapasitas

- organisasi sehingga dapat lebih efektif mengendalikan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Solok
2. Kedepannya pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan lebih ditingkatkan sesuai dengan target indikator kinerja yang ditetapkan.
  3. Untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar kedepannya perlu Peningkatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terhadap masyarakat, Lembaga Pemerintahan, Badan Hukum dan apatur.
  4. Peningkatan kinerja profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar dengan pelatihan Teknis dan non teknis guna mewujudkan SDM aparatur yang handal, professional serta menguasai Teknologi Informasi dan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penambahan aparatur PPNS untuk lebih memperlancar kegiatan penyidikan baik secara yustisi maupun non yustisi
  5. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Linmas dengan melakukan Pembinaan, pelatihan terhadap tugas dan fungsinya.
  6. Adanya kesepakatan /MOU antar kabupaten /kota dalam penanganan kejadian bencana dan kebakaran dan juga perlu adanya MOU dalam penanganan Tibumtramas dengan daerah tetangga sehingga terbentuk koordinasi takaraja yang harmonis antar Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
  7. Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang operasional ketentraman dan ketertiban umum masyarakat dan Pemadam kebakaran.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Solok Tahun 2021 sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian kinerja, tujuan dan sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Solok.

**Arosuka, Pebruari 2022**  
**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan**  
**Pemadam Kebakaran Kab.Solok**



**ELAFKI, SPd.MM**  
**NIP.196911122000121002**

# LAMPIRAN - LAMPIRAN





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALKAMRA ADLIS,SH.MM

Jabatan : Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam  
Kebakaran Kabupaten Solok

Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : EPYARDI ASDA,M.Mar

Jabatan : BUPATI SOLOK

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Arosuka, November 2021

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**H.EPYARDI ASDA,M.Mar**

**ALKAMRA ADLIS,SH.MM**  
NIP. 19700708 199203 1008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**UNIT KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target
1.	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta perlindungan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Penegakan Perda Persentase Cakupan Petugas Perlindungan masyarakat	3,24 100 87,97
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran	Persentase Cakupan pelayanan bencana kebakaran dalam kabupaten/kota Persentase Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	44,44 100
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketentraman, ketertiban umum dan pemadam kebakaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Indeks kepuasan aparatur	(BB) 77 2,51

Kegiatan:


No	Program	Anggaran
1	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.748.469.180.-
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 2.440.339.450.-
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp. 2.192.922.500.-

Arosuka, November 2021

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
dan Pemadam Kebakaran

BUPATI SOLOK

**H.EPYARDI ASDA, M.Mar**

  
**ALKAMRA ADLIS, SH.MM**  
 NIP. 19700708 199203 1008



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN PEMADAM KEBAKARAN  
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Solok Telepon (0755) 31559  
AROSUKA

LAPORAN KEGIATAN PENERTIBAN PELANGGARAN PERDA DAN PERBUP TAHUN 2021

SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran  
KABUPATEN : SOLOK  
PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Jenis Pelanggaran	Perda / Perbup yang dilanggar	Laporan	Tindak Lanjut			KET
				Pembinaan	Denda	Penertiban	
1	Penertiban balapan liar Penertiban Pelajar yang berkeliaran pada saat jam pelajaran dan Penyakit Masyarakat	Perda Nomor 9 tahun 2020 tentang Trantibum	10	-	-	10	masih adanya masyarakat yang tidak mengindahkan Perda Trantibum
2	Penertiban pemberian rekomendasi izin pemukiman bangunan sesuai pemamfaatan ruang	Perbup NO.38 Tahun 2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Izin Pemamfaatan Ruang	-	-	-	-	Pemberian izin rekomendasi sudah sesuai aturan
3	Penertiban bangunan tanpat izin (IMB)	Perda No 3 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung	2	-	-	2	sosialisasi
4	Pemungutan Retribusi jasa umum	Perda No.8 Tahn 2011 tentang Retribusi Jasa Umm	-	-	-	-	Tidak ada pelanggaran
5	Masih banyak Pegawai SKPD dan masyarakat yang merokok ditempat umum (Kawasan Tanpa Rokok)	Perda No.3 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok	-	-	-	-	SKPD terkait belum mempunyai data masyarakat yang melanggar Perda KTR
6	Kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	Tidak ada laporan pelanggaran
7	Masih terdapatnya SKPD dan kantor kecamatan yang tidak menyediakan ruangan ASI ( tempat menyusui)	Perda No.4 Tahun 2017 tentang Pemberin Air Susu Ibu Eksklusif	-	-	-	-	SKPD terkait belum mempunyai data jumlah SPKD yang belum menyediakan ruangan ASI
8	Penertiban pelanggaran terhadap masyarakat yang mempunyai ternak yang berpotensi penyakit Zoonosis/ penyakit menular	Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis	-	-	-	-	Sudah adanya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan ternak khususnya penyakit Zoonosis
9	Penertiban pada masyarakat yang tidak mengindahkan adaptasi protokol kesehatan	Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus 19	68	68	-	-	sosialisasi
Jumlah			80	68		12	

Arosuka, 31 Desember 2021  
Plt. Kepala  
ALKAHRAHULIS,SH.MM  
Nip.197608071992031008

**LAPORAN PENANGGULANGAN PENANGANAN KEJADIAN KEBAKARAN  
TAHUN 2021**

**BULAN : JANUARI s/d DESEMBER**

NO	HARI/ TANGGAL	URAIAN	LOKASI	INFORMASI KEJADIAN	WAKTU LAPOR	POS/REGU YANG MENANGANI	Waktu Respon (Menit)	WAKTU OPERASI	PERKIRAAN KERUGIAN	KORBAN SELAMAT (orang )	KORBAN TIDAK SELAMAT	MENGALAMI LUKA BAKAR DAN LUKA FISIK LAINNYA
1	Kamis/ 14 Januari 2021	Kebakaran Tempat Pembuatan Profil Bangunan (Rumah Usaha Dagang)	Jorong Halaban, Panyakalan, Kec. Kubung	Masyarakat	08.15 WIB	Regu VII (Koto Baru), Pendukung Regu IX & Regu VI	10	08.25 - 09.30 WIB (1 jam 5 menit)	± 80.000.000,00	7	-	-
2	Sabtu/ 16 Januari 2021	Kebakaran Rumah Usaha Dagang	Jorong Linawan, Sulit Air, Kec. X Koto Datas	Masyarakat	06.30 WIB	Regu V (Sumani), Pendukung Regu VIII (Koto Baru)	5	06.35 WIB - 10.30 WIB (3 jam 55 menit)	± 500.000.000,00	5	-	-
3	Selasa/ 19 Januari 2021	Kebakaran Bangunan Rumah Hunian	Jorong Bukit Kili, Koto Baru, Kec. Kubung	Masyarakat	12.01 WIB	Regu VI (Koto Baru), Pendukung Regu III & Regu IX	4	12.05 WIB - 14.20 WIB (2 jam 15 menit)	± 70.000.000,00	4	-	-
4	Rabu/ 20 Januari 2021	Kebakaran Lahan Masyarakat	Jorong Akar Gadang, SimpangTanjuang Nan Ampek, Kec. Danau Kembar	Masyarakat	18.30 WIB	Regu VII (Alahan Panjang)	2	18.32 WIB - 20.30 WIB (1 jam 58 menit)	-	-	-	-
5	Sabtu/ 30 Januari 2021	Kebakaran Rumah Hunian	Jorong Simpang Sawah Baliak, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung	Masyarakat	10.50 WIB	Regu V (Koto Baru)	5	10.55 WIB - 11.40 WIB (1 jam 25 menit)	-	3	-	-
6	Senin / 1 Februari 2021	Kebakaran rumah masyarakat An. Suardi (68 Th)	Jorong Kapalo Labuah, Nagari Saniang Baka, Kec. X Koto Singkarak	Masyarakat	04.25 WIB	Regu III (Sumani)	10	04.35 - 08.30 WIB (3 jam 45 menit)	± Rp. 1.500.000.000,00	4	-	-
7	Selasa / 9 Februari 2021	Kebakaran lahan UPTD pertanian	Jorong Rawang, Kec. Lembah Gumanti, Alahan Panjang	Masyarakat	14.58 WIB	Regu III (Alahan Panjang) backup Regu XII (Kayu Aro)	7	15.05 - 18.15 WIB (3 jam 10 menit)	± Rp. 5.000.000,00	-	-	-
8	Jum'at / 12 Februari 2021	Kebakaran lahan gambut Disan Pariwisata	Jorong Taratak Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti	Masyarakat	13.45 WIB	Regu XII (Alahan Panjang) backup Regu IX (Kayu Aro)	5	13.50 - 16.00 WIB (3 jam )	-	-	-	-
9	Jum'at / 12 Februari 2021	Kebakaran lahan non produktif	Jorong Simpang Sawah Sianik, Nagari Koto Baru, Kec. Kubung	Masyarakat	16.50 WIB	Regu VI (Koto Baru)	5	16.55 - 17.40 WIB (45 menit)	-	-	-	-
10	Jum'at / 12 Februari 2021	Kebakaran lahan produktif	Jorong Saniang Baka, Nagari Saniang Baka, Kec. X Koto Singkarak	Masyarakat	18.10 WIB	Regu III (Sumani)	2	18.12 - 20.55 WIB (3 jam)	± Rp. 15.000.000,00	-	-	-

23	Rabu/ 9 Juni 2021	Kebakaran Rumah Hunian semi permanen, An. Mayarni 55Th)	Jorong Pasar, Nagari Bukit Silih, Kec. Lembang Jaya	Masyarakat	01.15 WIB	Arosuka/ Regu XI	6	01.21 - 02.35 WIB (1 Jam 14 Menit)	± 200.000.000,00	4	-	-
24	Minggu/ 20 Juni 2021	Kebakaran Pohon Kelapa	Jorong Tampuaniak, Nagari Salayo, Kec. Kubung	Masyarakat	11.28 WIB	Koto Baru/ Regu 8	2	11.30 WIB - 12.25 (95 Menit)	-	-	-	-
25	Senin, 19 Juli 2021	Kebakaran lahan masyarakat di dekat villa seribu ban	Jorong Aia Angek Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	Masyarakat Sekitar	14.40 WIB	Sumani / Regu X	5	14.45 - 17.01 WIB (2 Jam 56 Menit)	-	-	-	-
26	Senin, 19 Juli 2021	Kebakaran lahan masyarakat di dekat villa seribu ban	Jorong Aia Angek Saniang Baka Kec. X Koto Singkarak, Kab. Solok	Masyarakat Sekitar	21.24 WIB	Sumani / Regu X	6	21.30 - 23.00 WIB (1 jam 30 Menit)	-	-	-	-
27	Senin, 19 Juli 2021	Kebakaran lahan di Alahan Panjang	Jorong Rawang, Nagari Alahan panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	Masyarakat	14.00 WIB	Alhan Panjang / Regu VII	3	14.03 - 15.15 WIB (1 Jam 12 Menit)	-	-	-	-
28	Jumat, 23 Juli 2021	Kebakaran lahan di dekat fila Alahan Panjang	Jorong Taratak, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	Masyarakat	15.03 WIB	Alahan Panjang/ Regu V, Backup Arosuka/ Regu II	2	15.05 - 17.41 WIB (2 Jam 34 Menit)	-	-	-	-
29	Jumat, 23 Juli 2021	Kebakaran lahan rumpun bambu di Talang	Jorong Tabek Pala, Nagari Talang, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	Masyarakat	15.00 WIB	Koto Baru/ Regu XI	10	15.10 - 16.30 WIB (1 Jam 20 Menit)	-	-	-	-
30	Jumat, 23 Juli 2021	Kebakaran lahan di gagoan panningahan	Jorong Koto Baru Tambak, Kec. Junjung Sirih	Masyarakat	20.07 WIB	Sumani / Regu VIII	8	20.15 - 21.00 WIB (45 Menit)	-	-	-	-
31	Kamis, 29 Juli 2021	Kebakaran 4 rumah warga di salimpek, Rumah a/n Ermaniza(50th), Restati(64th), Yasimar(47th), dan Yelmi(62th). Profesi Tani	Jorong Salimpek, Nagari Salimpek, Kec. Lembah Gumanti, Kab. Solok	Setgas Damkar	16.30 WIB	Alahan Panjang/ Regu XI	5	16.35-18.45 WIB (2 Jam 15 Menit)	± Rp. 700.000.000,00	20	-	-
32	Senin/ 2 Agustus 2021	Kebakaran Lahan warga	Dama Resto, Nagari Kinari, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok	Laporan Warga	21.20 wib	Regu XII/ Pos Kotobaru	10	21.30 - 23.30 wib ( 2 jam)	-	-	-	-
33	Selasa/ 10 Agustus 2021	Kebakaran Rumah warga	Jorong Sawah kandih, Nagari Bukit Tandang, Kec. Bukok Sundi	Laporan Warga	08.55 wib	Regu V/ Pos Kotobaru , Backup Regu II/ Pos Sumani	5	09.00 - 10.30 wib (1 jam 30 menit)	-	5	-	-
34	Sabtu/ 14 Agustus 2021	Kebakaran Kantor BMN, PAUD dan Posyandu	Jorong Koto Tuo, Nagari Sulit Air, Kec. X Koto Singkarak	Laporan Warga	04.58 wib	Regu XI/ Pos Sumani, Backup Regu II/ Pos Koto baru	2	05.00 - 08.30 wib (3 jam 30 Menit)	Rp.300.000.000,-	-	-	-

35	Sabtu/ 21 Agustus 2021	Kebakaran 7 Unit Toko, dan 15 Unit Rumah Terdampak	RT 01 RW 05 Kel. PPA Kec. Tj. Harapan Kota Solok	Laporan Warga	01.25 wib	Damkar Kota solok, Backup Regu IX/Pos Kotobaru, Regu VI /Pos Sumani/ Damkar Padang Panjang	5	01.30 -05.30 wib (4 jam)	Rp.5000.000.000,-	51	-	-
36	Jumat/ 27 Agustus 2021	Kebakaran Rumah warga	Jorong Panyalai, Nagari Sumani, Kec. X Koto Singkarak	Laporan Warga	04.58 wib	Regu XII/ Pos Sumani	2	05.00 - 05.30 wib (30 Menit)	Rp.10.0000.000,-	3	-	-
37	Senin/ 30 Agustus 2021	Kebakaran Rumah warga	Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak	Laporan Warga	13.58 wib	Regu IV/ Pos Sumani, Backup Regu VII/ Pos Koto Baru	2	14.00 - 17.00 wib (3 jam)	-	7	-	-
38	Rabu/ 01 September 2021	Kebakaran Rumah Penjaga Sekolah SD Negeri 17	Jorong Lambah, Nagari Batu Banyak, Kec. Lembang Jaya	Laporan Warga	00.28 wib	Regu XI/ Pos Alahan Panjang, Backup Regu V/ Pos Koto Baru	2	00.30 - 03.15 wib (2 jam 45 menit)	Rp.60.000.000,-	3	-	-
39	Kamis/ 02 September 2021	Kebakaran Lahan	Jorong Alahan Panjang, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembang Jaya	Laporan Warga	12.28 wib	Regu XII/ Pos Alahan Panjang	2	12.30 - 13.30 wib (1 jam)	-	-	-	-
40	Sabtu/ 04 September 2021	Kebakaran Rumah Warga	Jorong Singkarak, Nagari Singkarak, Kec. X Koto Singkarak	Laporan Warga	02.28 wib	Regu II/ Pos Sumani	2	02.30 - 06.30 wib (4jam)	Rp.10.000.000,-	4	-	-
41	Selasa/ 14 September 2021	Kebakaran Rumah Warga	Jaambatan Basi, Nagari Alahan Panjang, Kec. Lembah Gumanti	Laporan Warga	11.00 wib	Regu X/ Pos Alahan Panjang, Backup Regu VII/ Pos Arosuka	10	11.10 - 13.14 wib (2 jam 2 menit)	Rp.50.000.000,-	4	-	-
42	Senin/ 20 September 2021	Kebakaran Rumah Warga	Jorong Ujuang Gurun, Nagari Selayo, Kec. Kubung	Laporan Warga	12.55 wib	Regu VII/ Pos Ko Baru, Backup Regu X/ Pos Sumani, Damkar Kota Solok	5	13.00 - 17.00 wib (4 jam)	-	4	-	-
43	Rabu/ 22 September 2021	Kebakaran Pabrik Porang	Jorong Saok Laweh, Nagari Saok Laweh, Kec. Kubung	Laporan Warga	17.00 wib	Regu XII/ Pos Sumani	8	17.08 - 18.30 wib	Rp.30.000.000,-	-	-	-
44	Selasa/ 28 September 2021	Kebakaran Rumah Warga	Jorong Cubadak, Nagari Aie Dingin, Kec. Lembah Gumanti	Laporan Warga	09.15wib	Regu XI dan Regu XII/ Pos Alahan Panjang	5	09.20 - 10.30 wib	Rp.100.000.000,-	3	-	-
45	Jumat/ 08 Oktober 2021	Kebakaran Rumah Warga	Padang Kunyit Jorong Sawah Sudut, Nagari Selayo, Kec. Kubung	Pak Jorong	19.30 wib	Regu I/ Pos Koto Baru	5	19.35 - 21.35 wib (2 jam)	Rp.60.000.000,-	2	-	-
46	Selasa/ 12 Oktober 2021	Kebakaran Lahan	Nagari Muara Pingai, Kec. X Koto Singkarak	Wali Nagari	15.58 wib	Regu XI/ Pos Sumani	2	16.00 - 18.30 wib (1 jam 30 menit)	Rp.10.000.000,-	-	-	-

59	Sabtu/ 27 November 2021	Kebakaran Rumah	Jorong Taratak Baru, Nagari Sahimpek, Kec. Lembah Gumanti	laporan Warga	14.01 wib	Regu XII/ Pos Alahan Panjang	4	14.05 - 15.50 wib (1 jam 45 menit)	Rp 1.000.000	4	-	-
60	Senin/ 29 November 2021	Kebakaran lahan	Nagari Supayang, Kec. Payung Sekaki	laporan Warga	10.25 wib	Regu II/ Pos Koto Baru	5	10.30 - 14.15 wib (3 jam 45 menit)	-	-	-	-
61	Senin/ 29 November 2021	Kebakaran lahan	Nagari Kubang Duo, Kec. Payung Sekaki	laporan Warga	18.35 wib	Regu II/ Pos Koto Baru	5	18.40 - 21.15 wib (3 jam 35 menit)	-	-	-	-
62	Jumat/ 03 Desember 2021	Kebakaran lahan	Kubang Kelampayan, Nagari Paninjauan, Kec. X Koto Datas	laporan Warga	20.00 wib	Regu IX/Pos Sumani, Backup Rewgu XII/ Pos Koto Baru	5	20.05 - 23.25 wib (3 jam 20 menit)	-	-	-	-
63	Selasa/ 07 Desember 2021	Kebakaran Rumah	Pasa Usang, Nagari Oguak, Kec. Kubung	laporan Warga	11.03 wib	Regu XII/ Pos Arosuka	2	11.05 - 12.10 wib (55 menit)	Rp 10.000.000	2	-	-
64	Selas/ 27 Desember 2021	Kebakaran Rumah	Galanggang Tengah, Nagari Salayo, Kec. Kubung	Laporan Pak Jorong	10.58 wib	Regu XII/ Pos Koto Baru	2	11.00 - 13.00 wib (2 jam)	-	3	-	-
						Total Response Time	290					
						Rata-rata Response Time	4,53					

Keterangan

- Jumlah penanganan Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Solok

: 64





## **BUPATI SOLOK**

### **KEPUTUSAN BUPATI SOLOK**

**NOMOR : 332- 296- 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 332-385-2017 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NAGARI SE  
KABUPATEN SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membantu Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat di nagari telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 332-385-2017 tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari se Kabupaten Solok;
  - b. Karena adanya penggantian personil Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari maka terhadap Keputusan Bupati tersebut perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 332-385-2017 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia;





3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Nomor 332-385-2017 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari se Kabupaten Solok sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari sebagaimana dalam melaksanakan berpedoman kepada Keputusan Bupati Nomor 332-385-2017 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari se Kabupaten Solok.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja masing-masing Nagari.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada Tanggal 19 Juni 2020

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**

  
**SYAMSUL BAHRI**

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SOLOK  
 NOMOR : 332 - 296 - 2020  
 TANGGAL : 19 JUNI 2020

SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NAGARI SE  
 KABUPATEN SOLOK

NO	KECAMATAN	NAGARI	NAMA	NOMOR ANGGOTA
1	Kec. Gunung Talang	1 Sungai Janiah	1 SADRI WIJAYA	001
			2 SURYADI HANDOKO	002
			3 MARDISYAF	003
			4 RINAS YUNIKO	004
			5 ELVA WANDRA	005
			6 RALFITRIANTO	006
			7 SUPRIYADI JOYO	007
			8 MUNAS	008
			9 SAFRIONO	009
			10 IRWANSYAH	010
		2 Talang	11 RICHI ADINANTA	011
			12 MULYADI	012
			13 HANTER KADAFI	013
			14 SYAFRIZAL / BOGEL	014
			15 AIDISON / BUYUANG	015
			16 FEBI SUFIANTA	016
			17 SARADI	017
			18 SUBERTA	018
			19 SYAFRIADI	019
			20 EPI JAYA	020
		3 Jawi-Jawi	21 YARMIJON	021
			22 ILHAM DANI	022
			23 ZUL AMRI	023
			24 ADRI IYI	024
			25 ZULMI HENDRI	025
			26 ALIYUS	026
			27 WARDI	027
			28 MARKELI	028
			29 YOVIT MARZONI	029
			30 SABRI NALDI	030
		4 Koto Gaek Guguk	31 ARMAN DESPI	031
			32 YONI SASPUTRA	032
			33 LASMI ADIMAS	033
			34 MASRIZAL	034
			35 NASRA BAHAGIA	035
			36 GANI	036
			37 UMAR FADLI	037
			38 RAHMAT	038
			39 HERMAN PELANI	039
			40 SETIA IRWANTO	040
		5 Koto Gadang Guguk	41 NIKO ALEXSIL. P	041
			42 IYIN	042
			43 APRIZAL ( LENYOH )	043
			44 APRIZAL ( JAMEK )	044
			45 BENDRI	045
			46 ADRIFIL	046
			47 PATRINALDI	047
			48 KASMIR	048
			49 RALISKA	049
			50 ENTRY	050
		6 Cupak	51 ZULKIFLI	051
			52 ANDRI MARJONAH	052
			53 DELZI MUSNAR	053
			54 YURIDEN	054
			55 WANDRA	055
			56 UUN AZHARA	056
			57 NIZALIMAT	057
			58 ALI NASRUL	058
			59 YOSI HENDRI	059
			60 ANWAR	060

2/5 f.

1	2	3	5	6	7
		7 Batang Barus	61	BAKSON TIDOR	061
			62	M.MUYAR	062
			63	SYAFRIZUL	063
			64	BASRI	064
			65	DEPI ALMON	065
			66	MUSRI	066
			67	HENDRI	067
			68	JONI INDRA	068
			69	SUHERMAN	069
			70	HARIANI	070
			71	YONDRI	071
			72	YOSRIADI	072
		8 Air Batumbuk	73	AMRIL	073
			74	YON MAIZAL	074
			75	ZULKIFLI	075
			76	YULIWAN PUTRA	076
			77	WENGKI RIOLA DESRA	077
			78	HENDRI MIZON	078
			79	MARKIO	079
			80	JAFRI JAS	080
			81	HENDRIZON	081
			82	SYAFRIDUL	082
2	Kec. Kubung	1 Koto Baru	83	ELMISON	083
			84	FIRMA YUDI	084
			85	HENDRI KOPERMI	085
			86	FALZA	086
			87	PUJA INDRA	087
			88	ASTA KURNIA	088
			89	IKHWANUL FAJRI	089
			90	IRWAN	090
			91	ARLIS	091
			92	MICHAEL YUSTERINO	092
		2 Panyakalan	93	SABRI CANIAGO	093
			94	ADRIANUS	094
			95	ADRIAN JHONY SUBRATA	095
			96	ALKABA ASRI	096
			97	WALDATUL AKMAL	097
			98	ADRIASMAN	098
			99	SAMUILLOIS	099
			100	SUDIRMAN	100
			101	SUPRAPTO	101
			102	LISFA HENDRI	102
			103	THAMRIN	103
			104	NORMAL EDISON	104
			105	DELI FADRI	105
			106	HIFDI EFENDI	106
			107	SUHARDIJON	107
			108	MENNIJA	108
		3 Gauang	109	ABDURRAHMAN	109
			110	ANDRE	110
			111	MUSNIR	111
			112	SUHERMAN	112
			113	DORI FERNANDES. M	113
			114	SUTIARMON	114
		4 Selayo	115	SONY SUBRATA	115
			116	MAIDEL PUTRA	116
			117	DAFITRA ALFA	117
			118	BONI AFRIZAL	118
			119	RABUSAR	119
			120	ALPENDRA	120
			121	SUHARJO	121
			122	JHON MARJONO	122
			123	MASRIL	123
			124	SEPRADONI	124

26 f.

1	2	3	5	6	7
		5 Tanjung Bungkung	125	ERIK SUSANTO	125
			126	SYAMSUL HERMAN	126
			127	KAMERONI	127
			128	WIRMAN SYAHRIL	128
			129	MARDIANTO	129
			130	MENDOLI FEBRIYADI	130
		6 Koto Hilalang	131	WINDRA MARGIA	131
			132	M. AURI	132
			133	RUSMAN	133
			134	YOS AMRI	134
			135	AGUSDIMAN	135
			136	ASRUL	136
			137	YULI HENDRA	137
			138	BENI ASRI	138
			139	SAFRINALDI	139
			140	INDRA WADI	140
		7 Saok Laweh	141	HASAN BASRI	141
			142	AHMAD MUTAKHIR	142
			143	SARONO	143
			144	YANTRI MARSA	144
			145	NASRIL	145
			146	WAHYU ALFIKRI	146
			147	SYAWALI	147
			148	DARWIN	148
		8 Gantuang Ciri	149	SYAFRA	149
			150	ZEMI ERWINDRA	150
			151	KHAIRUL	151
			152	TOMI FERDINAL	152
			153	ABDUL HADI	153
			154	SYAIR JHON	154
			155	WINDRA	155
			156	ALFATROL	156
			157	ZULKIFLI	157
			158	JAMHIR	158
			159	TIRTA YASA	159
			160	DONI HARZEN	160
			161	TARNIDA	161
			162	AMIRDAS	162
			163	SYAFNISERA	163
			164	BUSBARTO	164
			165	SYUKRI	165
			166	WILI HERMAN	166
			167	SYAFRIANO	167
			168	ABRIANTO	168
			169	YULNAFRI	169
			170	ROMI PUTRA	170
			171	M. HANIF	171
			172	TITICA	172
			173	MARDIANTO	173
			174	SYAFRIANTO	174
			175	AGUSTAR	175
			176	HADI AKMAL	176
			177	HARSOL	177
3	Kec. X Koto Singkarak	1 Singkarak	178	NURMAN PONO	178
			179	ASRIALMI	179
			180	DASRIL	180
			181	ERIZAL	181
			182	HAJIBRIL HARUN	182
			183	DEDI EFRIZAL	183
			184	FIRDAUS	184
			185	EPI ZAMZALIK	185
			186	IRWAN	186
			187		187
		2 Koto Sani	188	ZAINI SUHERMAN	188
			189	DORI WANTO	189
			190	ISKANDAR	190
			191	ALIYAS	191
			192	NESRA	192

AK f.

1	2	3	5	6	7
			193	YUNDRI AHMAID	193
			194	MESSI PERNANDES	194
			195	SAPRIYAL	195
			196	JASRIL	196
			197	EKI PRATAMA	197
		3 TJ. Alai	198	SYAFI	198
			199	DARMAN	199
			200	YASMET	200
			201	MUSLIM OKTA PERI	201
			202	ZULYADI	202
			203	DASMAN	203
			204	ANDRE PELANGI	204
			205	AMANI	205
		4 Saniang Baka	206	REFLIZON	206
			207	HANAFI	207
			208	FERI ERIANDO	208
			209	IRMAN	209
			210	DALIMI	210
			211	AFRIZAL ST SATI	211
			212	RISMAN MAK ETEK	212
			213	HENDRIYANTO	213
			214	SON PUTRA	214
			215	YOPI AFDA	215
		5 Sumani	216	ALEX ANDRO ILYAS	216
			217	RIFKA OKTA SAPUTRA	217
			218	SOFYAN EFENDI	218
			219	BOBY SAPUTRA	219
			220	DERI	220
			221	NAFI UDIN	221
		6 Kacang	222	NASRIL	222
			223	AYONK	223
			224	FITRI YANTO	224
			225	RIKO JUNAIDI	225
			226	AFNEL	226
			227	WILDIMAN	227
			228	SYAWAL	228
			229	SYAFRIYAL	229
			230	ALI IMRAN	230
			231	MAWARDI	231
		7 Aripan	232	MARJANIUS	232
			233	BUSTANIL ARIFIN	233
			234	ARPIL	234
			235	ZULKIFLI	235
			236	BUJANG DAUD	236
			237	ZUARMED EDWAR	237
			238	SYAHRIAL	238
			239	AFRIZAL	239
			240	SAPARUDDIN	240
			241	RAMLAN	241
		8 Tikalak	242	OKI DANUARTA	242
			243	HERWANDI	243
			244	NASRIL	244
			245	TARMIZI	245
			246	HARMAIDI	246
			247	DARWIN	247
			248	AMINUDIN	248
			249	M.HAZBI	249
			250	ARIF RAHMADHANI	250
			251	NOFRIZAL	251
4	Kec. IX Koto Sungai Lasi	1 Bukit Bais	252	DINAN T	252
			253	SYAMSIMAR	253
			254	JUBAHAR	254
			255	ARNALIS	255
			256	DASINOL	256
			257	JUSMAR	257
			258	SALNADI	258
			259	ADINAN M	259
			260	YURNLIS	260
			261	BARULIS	261

2/15/19

1	2	3	4	5	6	7	
		2	Siaro-Aro	4	262	UNTUNG	262
					263	HENDRIANTO	263
					264	MASRI	264
					265	APRIZAL	265
		3	Sungai Durian	10	266	ANDI ISRON	266
					267	MUSRIL K	267
					268	MAWIR	268
					269	DASWIR	269
					270	YOZI PERMANA	270
					271	AFRIZAL FERLI	271
					272	TRI Fianto	272
					273	ALI AKBAR	273
					274	TERIONO	274
					275	ALIWAR	275
		4	Pianggu	10	276	ALI CHANIA	276
					277	ARISWAN	277
					278	RADIUS	278
					279	ZUL KAMADANIR	279
					280	DONNI	280
					281	MUHAMMAD YUNUS	281
					282	ZULWAIDI	282
					283	RADIUS	283
					284	YASRIL	284
					285	ARMISON	285
		5	Guguak Sarai	10	286	PENDRIZAL	286
					287	ALI AMRAN	287
					288	SARIMIN	288
					289	EFRIANDI MULIA	289
					290	ZULKAIIDI	290
					291	ASRIANDI	291
					292	DARLIS	292
					293	ISLAMI MAHDI	293
					294	NANDA NIRMANSYAH	294
					295	AYUB SAMAH	295
		6	Indudur	10	296	EDI NARSON	296
					297	YUSPARMANTO	297
					298	ADIDELMANSYAH	298
					299	ZULBAHRI	299
					300	ASRUL	300
					301	YOSI RINALDI	301
					302	AHMAD KAMINI	302
					303	BATIAN MAJID	303
					304	HUSNAL KAMAL	304
					305	EDI ARMAN	305
		7	Taruang-Taruang	10	306	DONI FESRA	306
					307	YONHARDI	307
					308	YUNLIADI	308
					309	BATMISKAR	309
					310	FIRMANSYAH	310
					311	ADRIJON	311
					312	SYAFRINAL	312
					313	MASRIZAL	313
					314	MASWIR	314
					315	ARMIZAL	315
		8	Sungai Jambur	10	316	KASRIAL	316
					317	MAIZOR KICOK	317
					318	MAIZARLI	318
					319	YSRIN ALAU	319
					320	AFRIZAL CANG	320
					321	JAL HENDRI	321
					322	MARZUKI	322
					323	MASRICON	323
					324	DASRIL	324
					325	NOFRIADI	325
		9	Koto Laweh	2	326	KAMINUR	326
					327	KAMILUR	327
5	Kec. Bukit Sundi	1	Kinari	10	328	SUARDI SIAK BATUAH	328
					329	HENDRA DASMAN PUTRA	329
					330	AFRI HENGKI	330

25 f

1	2	3	5	6	7
			331	WARDISON	331
			332	RIO ILHAM MAHMUDA	332
			333	JON FENDI	333
			334	AMRIZAL	334
			335	SYAIFUL	335
			336	MULFI GUSNEDI	336
			337	HENDRI. Y	337
		2 Dilam 10	338	AFRIZAL	338
			339	YUFIRMAN	339
			340	JONI ISKANDAR	340
			341	SYAFRUDDIN	341
			342	MUSPARDI	342
			343	RAHMATALIL AGUNG	343
			344	AHMAD RIZALMAN	344
			345	MISWARDI	345
			346	FRENGKY.S	346
			347	JALNA PION	347
		3 Parambahan 10	348	SALMAN	348
			349	ZULFATRI	349
			350	TONI FEBRIALI	350
			351	MARDONI	351
			352	DUARDI	352
			353	ROBIANTO	353
			354	JAPRIZAL	354
			355	PATRIZAL	355
			356	KHAIRUL ANWAR	356
			357	NOFRENGKI	357
		4 Muaro Paneh 10	358	HARIS NASUTION	358
			359	M. NUR	359
			360	ULIL AMRI	360
			361	JASRIL	361
			362	WILSON	362
			363	SYAMSUL BAHRI	363
			364	BUDI	364
			365	JONI FIRGO	365
			366	FAUZAN ASMAR	366
			367	ZULKIFLI	367
		5 Bukik Tandang 10	368	ASRIZAL	368
			369	AKMAL	369
			370	ZULFAHMI	370
			371	ZAIPUDIN ZUBRI	371
			372	HAJRUL ASWAD	372
			373	IDRIS	373
			374	MARWANTO	374
			375	AFRIZAL TANJUNG	375
			376	DEDES	376
			377	MONDALIA	377
6	Kec. Junjung Sirih	1 M. Pingai 6	378	RUSMAN	378
			379	YULI MUSIDIK	379
			380	DEKI AFRISONAL	380
			381	SYAFRUDIN	381
			382	MURTIONO	382
			383	MUSTAF	383
		2 Panningahan 6	384	GUNTUR	384
			385	MARLUS	385
			386	ARMEN	386
			387	EDIJEN	387
			388	YULI ERMAN	388
			389	ALYAFAUZI	389
7	Kec. Lembang Jaya	1 Koto Laweh 6	390	ADRIANTO	390
			391	GUSMAN EFENDI	391
			392	AMIRUDIN	392
			393	PENDRIZAL	393
			394	SYAHRIL	394
			395	YUNARLIS	395
		2 Selayo Tanang 6	396	SYAFRIL	396
			397	EDI CANDRA	397
			398	MICHAEL CANDRA	398
			399	BUSRAL	399
			400	TASMAN	400
			401	KARTONO	401

95 P.

1	2	3	4	5	6	7	
		3	Batu Bajanjang	6	402	DASRIL	402
					403	ASRIL	403
					404	ZULKAMBRA	404
					405	NIKO TOMA	405
					406	ALFI SUSANTO	406
					407	MARDISON	407
		4	Limau Lunggo	6	408	HADMI	408
					409	SYAFRIANTO	409
					410	YUNIZAR	410
					411	ANASRIL	411
					412	ZUNDRA KOTA	412
					413	KAMISAR	413
		5	Batu Banyak	6	414	PERI YETNO	414
					415	ALI AKBAR	415
					416	ANTO YONDRA	416
					417	YUDI PRATAMA	417
					418	ZONDRA MULYADI	418
					419	HARDIANTO	419
		6	Koto Anau	6	420	OLIJON	420
					421	ADE SUHENDRA	421
					422	TONI SAPUTRA	422
					423	ADAMRI	423
					424	AINUR AZMI PUTRA	424
					425	PRIMA DONI	425
8	Kec. X Koto Diatas	1	Sibarambang	4	426	SILIM MUSTAKIM	426
					427	RUDI NOFRIKA	427
					428	RIFMULYANTO	428
					429	DUSRIANTO	429
		2	Kuncir	4	430	SYAHRUL MAIZAN	430
					431	INOL FITRI	431
					432	NASRUL	432
					433	MARIZAL	433
		3	Paninjauan	5	434	MUKLIS	434
					435	RAHMAT JONI	435
					436	AMRIZAL	436
					437	MUSLIM	437
					438	EFRIYANTO	438
		4	Labuah Panjang	5	439	MASRI EDI	439
					440	FIRDAUS	440
					441	DESMARICON	441
		5	Tanjung Balik	6	442	AHMAD JUNI	442
					443	ASRIZAL	443
					444	EDO SAPUTRA	444
					445	ROBINSON	445
					446	KAMARUDIN	446
					447	ILMAR	447
		6	Pasilihan	6	448	MAIZALDI	448
					449	ZUFRAHMAN	449
					450	JEFRI ZALMI	450
					451	DASRIZAL	451
					452	ADE EKA PUTRA	452
					453	SYAMSURIZAL	453
		7	Bukit Kandang	4	454	GUSRIYONTISMON	454
					455	IRWANDI	455
					456	JHOMI BASTIAN	456
					457	MARTIAS	457
		8	Katialo	5	458	WARLI	458
					459	TASRUL	459
					460	YOSPARTO	460
					461	JEFRI PUTRA	461
					462	JAMARIS	462
		9	Sulit Air	6	463	ARMEN SAPUTRA	463
					464	ZULHENDRI EKA	464
					465	TASMIANTO	465
					466	SYAMSURIZAL	466
					467	ARMANTO	467
					468	MASRIL	468
9	Kec. Danau Kembar	1	Simp. TJ. Nan IV	10	469	BAKHDIAR	469
					470	BAKRANTO	470
					471	ERMAN D	471
					472	ARMICON	472
					473	DEDI MARTA	473



1	2	3	5	6	7
			474	FIRMAN	474
			475	SYAFRIZAL	475
			476	ERIZAL	476
			477	SUARDI	477
			478	ARDI	478
		2 Kamp. Batu Dalam	479	BUJANG	479
			480	BAINUR	480
			481	ZULFADLI	481
			482	RISMAN	482
			483	SII	483
			484	SAHRIWAL	484
			485	BASRI JAYA	485
			486	DONI AFRIZAL	486
			487	RUSDI	487
			488	KARIMI	488
10	Kec. Pantai Cermin	1 Surian	489	ERDISON	489
			490	YOSI AFELIA PUTRA	490
			491	NANDA PRIMA KEMALA	491
			492	SAFRI JONI	492
			493	PATRIANTO	493
			494	PUTRA ENDRIAN	494
		2 Lolo	495	CANDRA ERIZON	495
			496	RINALDI ZUKRA	496
			497	ARJONI	497
			498	ZULFA HENDRI	498
			499	ADRIZAL	499
			500	MUHAMMAD EDY	500
11	Kec. Payung Sekaki	1 Supayang	501	MUHAMMAD FARHAN	501
			502	TEDI HARTINDO	502
			503	OCHFINDRIAN	503
			504	ALI SABRI	504
			505	IDRA	505
			506	INDRA JAYA	506
			507	AFRIZAL. B	507
			508	AGI TAMA ISWARA	508
			509	ALFI YUSRI	509
			510	ZULMASRI	510
		2 Aie Luo	511	NISAKMAN	511
			512	ALI MARTOPO	512
			513	ALI IMRAN	513
			514	BUSTAMAN	514
			515	ALI MARJONO	515
			516	TARMIZI	516
			517	AKRAL DINATA	517
			518	SAMSIR	518
			519	PONDRIADI	519
			520	BUJANG DAREMI	520
		3 Sirukam	521	NOFRIZAL	521
			522	MASPAR	522
			523	JASRIADI	523
			524	AMRIZAL	524
			525	JONI RISMON	525
			526	DESRA TOMI FAJRI	526
			527	NORI ZALDI INDRA PUTR	527
			528	AFDAL ZIKRI	528
			529	MASRIL	529
			530	M. ZAMPELTI	530
12	Kec. Hiliran Gumanti	1 Talang Babungo	531	SUTRA FIRDAUS	531
			532	SYAFRIYAL	532
			533	ULKANEDI	533
			534	SAHRIAL	534
			535	AFRI YELTA	535
			536	ALTRIS WENDRA	536
			537	ZULDARISWAL	537
			538	MULYADI	538
			539	ALFIRMAN	539
			540	SYAHRUL	540
		2 Sariek Alahan Tigo	541	ZULAIMAN	541
			542	ERIMADOLA	542
			543	AMRIZAL	543
			544	ABANG LILI	544

ek p.

1	2	3	5	6	7
			545	SAFRIWAL	545
			546	ASRA	546
		3 Sungai Abu 10	547	ZULFITRI	547
			548	YUSRI MALAY	548
			549	CONDRA	549
			550	MADIRIN	550
			551	JASRIL	551
			552	ARZIL WANDI	552
			553	NASRUL	553
			554	RUDI HARTONO	554
			555	PATLI YUSRIL	555
			556	ERIZAL	556
13	Kec. Lembah Gumanti	1 Sungai Nanam 15	557	DEDE MAIKA CANDRA	557
			558	JONI KASNEI	558
			559	AMIRUDDIN	559
			560	JANUARMAN	560
			561	ANTONIO	561
			562	JONDRIONO	562
			563	SYAMSIR	563
			564	ENDRIZAL	564
			565	ALFITRIANTO	565
			566	SAFRUDIN	566
			567	ADRIANTO	567
			568	TASRIAL	568
			569	AULIA ZIKRI	569
			570	SRI CUN	570
			571	ZULHENDRI EKA	571
		2 Salimpek 10	572	AHMAD NURSAL	572
			573	HENDRA JAYA PUTRA	573
			574	WELHADI GUSRA	574
			575	YUSARDI	575
			576	SRI DOLA SUKMA	576
			577	ARSIL D	577
			578	DELFI SUKIRMAN	578
			579	HERI NALDI	579
			580	YUFRI NALDI	580
			581	ANASRIZAL	581
		3 Alahan Panjang 10	582	MASRIZAL EFENDI	582
			583	SONI ANDREAS	583
			584	MARJOHAN	584
			585	ZULNA WENDRI	585
			586	YOGI SYUKRI	586
			587	BERI SUKMANA	587
			588	JON KANEDI	588
			589	JUPRIANTO	589
			590	SOFIAN EFENDI	590
			591	TASAR	591
		4 Aie Dingin 10	592	ANDRE AGUSFA	592
			593	ASRUL LELO	593
			594	KASRIL	594
			595	JANUAR	595
			596	ADRI YUL FAUZI	596
			597	ANDRI	597
			598	RIZAL MUNIR Z	598
			599	SYAFRIZAL	599
			600	SAHWIJAL	600
			601	ZUL	601
14	Kec. Tigo Lurah	1 Batu Bajaranjang 10	602	WILDA EFENDI	602
			603	NOFRI MARDANIS	603
			604	MUJAMAR	604
			605	DATASRIL	605
			606	ROZI HANDANI	606
			607	LISDA YONANDA	607
			608	BUSTAMAN	608
			609	SARIWALDI	609
			610	RIDO ME'IRA	610
			611	ANUAR	611

26 f

1	2	3	5	6	7
		2 Simanau	612	INDRA JAYA	612
			613	SYAFRIJAL	613
			614	AIDIL FITRI	614
			615	JANUHIR	615
			616	BUJANG DATA MILUL	616
			617	RIO SAPUTRA	617
			618	HUTRILIS	618
			619	BUJANG DARMADI	619
			620	DISMAN	620
			621	KASMI	621
		3 Rangkiang Luluh	622	RAHMAT PUTRA	622
			623	DAILIH	623
			624	JAHAR	624
			625	MAWAR	625
			626	KAINI	626
			627	AIDIL FITRI	627
			628	SAPUI	628
			629	ABU NANSAR	629
			630	SAFRIL	630
			631	AMRIL	631
		4 T.J. Balik Sumiso	632	NURHADI	632
			633	CAPRIANTO	633
			634	ABU BAKAR	634
			635	ANTO	635
			636	SURU	636
			637	ANAS	637
			638	MARAN	638
			639	SIDEH	639
			640	DIMUS	640
			641	ERICK	641
		5 Garabak Data	642	DAMURUS	642
			643	HENDRA	643
			644	AFRINOLDI	644
			645	SUKARDI	645
			646	SYAWAL PUTRA	646
			647	JUNPATRIANTO	647
			648	SULVIA	648
			649	MASDI SOLVIA	649
			650	ZULMUAS	650
			651	MANSUR	651

**BUPATI SOLOK,**

dto

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUMDAN HAM,**

  
**SYAMSUL BAHRI**